

Nengah Arnawa, I Wayan Gunartha, I Nyoman Sadwika

KESANTUNAN HEGEMONIS BAHASA BALI

Studi Kasus Pada Awig-Awig Desa Pakraman



KESANTUNAN HEGEMONIS BAHASA BALI

Studi Kasus pada Awig-Awig Desa Pakraman

**Nengah Arnawa
I Wayan Gunartha
I Nyoman Sadwika**



2018

KESANTUNAN HEGEMONIS BAHASA BALI
Studi Kasus pada Awig-Awig Desa Pakraman

Penulis :

Nengah Arnawa
I Wayan Gunartha
I Nyoman Sadwika

Sampul dan tata letak :

A'Project

Penerbit :

Jayapangus Press
Jalan Ratna No. 51 Tonja,
Denpasar Utara 80236
Telepon (0361) 226656

Cetakan Pertama: 2018

ISBN 978-602-53492-3-2

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Mahaesa, IdaHyang Widhi, atas rahmat-Nya Buku *Kesantunan Hegemonis Bahasa Bali: Studi Kasus pada Awig-Awig Desa Pakraman* dapat diselesaikan. Buku ini merupakan salah satu luaran penelitian yang dibiayai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dana tersebut.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian laporan kemajuan ini berkat dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua YPLP PT IKIP PGRI Bali yang telah mendukung fasilitas penunjang penelitian;
2. Rektor IKIP PGRI Bali yang terus memotivasi para dosen untuk selalu melakukan penelitian;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, IKIP PGRI Bali yang ikut membantu dalam aspek administrasi.
4. Bendesa dan prajuru desa pakraman Penarukan, Baler Bale Agung, Batur Sari, Menanga, Rendang, dan Sumerta yang telah berkenan memberikan naskah awig-awig serta informasi yang sangat dibutuhkan.
5. Anggota tim peneliti dan tenaga pendukung teknis yang selalu bekerja sama dengan baik sejak perencanaan hingga penyusunan laporan akhir ini;
6. Berbagai pihak yang tidak disebutkan satu per satu yang telah berkontribusi terhadap penyelesaian laporan akhir

penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini sangat belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan dari para pembaca yang budiman. Atas kiritik dan masukan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Denpasar, 3 Desember 2018

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| PRAKATA | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| | |
| I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang dan Masalah Penelitian | 1 |
| 1.2 Masalah Penelitian | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.5 Metode Penelitian | 8 |
| | |
| II KONSEP, KAJIAN PUSTAKA, DAN KERANGKA TEORI.. | 11 |
| 1.1 Konsep | 11 |
| 1.2 Kajian Pustaka | 13 |
| 1.3 Kerangka Teori | 16 |
| | |
| III KARAKTERISTIK BAHASA BALI DALAM AWIG-AWIG | 19 |
| 1.1 Eksistensi dan Struktur Awig-Awig Desa Pakraman... | 19 |
| 1.2 Pembinaan Bahasa Bali | 22 |
| 1.3 Tindak Tutur dalam Awig-Awig Desa Pakraman | 25 |
| | |
| IV PENERAPAN MAKSIM KESANTUNAN BAHASA BALI.. | 55 |
| 1.1 Penggunaan Ragam Bahasa Bali Alus sebagai Penghormatan | 55 |
| 1.2 Maksim Kesopanan yang Digunakan | 57 |
| 1.3 Parameter Pragmatik Dominan | 60 |
| 1.4 Penerapan Prinsip Kerja sama | 61 |

| | | |
|-----|---|----|
| V | STRUKTUR GRAMATIKAL DAN KESANTUNAN | |
| | HEGEMONIS | 63 |
| 1.1 | Kajian Gramatikal Kesantunan Berbahasa Bali | 63 |
| 1.2 | Struktur Semantik Leksikal dan Kesantunan | |
| | Hegemonis | 67 |
| 1.3 | Pola Sintaksis dan Kesantunan Hegemonis | 71 |
| VI | TEMUAN, SIMPULAN, DAN SARAN | 75 |
| 1.1 | Temuan Penelitian | 75 |
| 1.2 | Simpulan | 76 |
| 1.3 | Saran | 77 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 78 |
| | LAMPIRAN | 82 |
| | INDEKS | 87 |
| | TENTANG PENULIS | 89 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Selain kemampuan berpikir, berbahasa merupakan ciri pembeda manusia. Dikatakan ciri pembeda, karena hanya manusia yang memiliki peranti pemerolehan bahasa. Sejak bayi kepadanya telah dipajankan kopos ujaran yang menyebabkan perkembangan pemerolehan bahasa oleh anak-anak sangat menakjubkan. Paradoks dengan realita ini, banyak orang memajukan bahasa kepada peliharaannya, tetapi binatang itu tetap tidak dapat memperoleh bahasa. Jawab atas realita ini, hanya manusia dianugerahi potensi pemilikan bahasa. Kekhususan ini menyebabkan bahasa dinyatakan sabagai unsur hakikat manusia. Menelaah bahasa diartikan mengkaji hakikat manusia untuk mencapai martabatnya. Harkat manusia adalah menjunjung kebenaran yang diungkapkan melalui penggunaan bahasa. Bahasa adalah sarana pengungkap kebenaran. Hubungan simteris ini menyebabkan pengkajian bahasa akan terus dilakukan malampaui batas zaman seperti orang mengkaji hakikat kebenaran. Pengkajian bahasa dilakukan dengan berbagai pendekatan dan sudutpandang sehingga menghasilkan berbagai aliran linguistik yang terusberkembang hingga abad ini dan nanti.

Salah satu aliran yang sangat populer hingga saat ini adalah linguistik struktural yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure, melalui karya monumentalnya *Cours de Linguistique Generale* (1916) dan Leonard Bloomfield melalui bukunya yang berjudul *Language* (1933). Dalam kajian linguistik struktural dinyatakan bahwa bahasa teridri dari dua unsur, yaitu penanda dan petanda (Saussure,1988). Penanda merupan unsur akustis atau bentuk sedangkan petanda adalah kesan atau makna. Oleh karena itu, sejak lama, kajian terhadap bahasa difokuskan

pada kedua aspek itu. Cabang-cabang linguistik yang menelaah aspek bentuk, yakni: fonetik, fonemik, morfologi, sintaksis, dan wacana. Fonetik menelaah bunyi bahasa secara fisik, yakni proses penciptaan bunyi-bunyi bahasa oleh alat ucap. Fonemik menelaah fonem suatu bahasa, yaitu bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi distingtif; baik bunyi segmental maupun suprasegmental. Morfologi menelaah aspek-aspek morfem dan proses pembentukan kata dalam suatu bahasa. Sintaksis menelaah unit bahasa di atas kata hingga kalimat. Objek kajian sintaksis meliputi frasa, klausa, dan kalimat. Terakhir, wacana menelaah unit bahasa di atas kalimat; seperti paragraf dan satuan yang lebih luas. Selanjutnya, cabang linguistik yang mengkaji aspek makna disebut semantik (Arnawa, 2008).

Selain dikotomi linguistik berdasarkan bentuk dan makna, Chomsky merumuskan dikotomi linguistik dengan berpijak pada kompetensi dan performansi. Kompetensi merupakan sistem abstraksuatu bahasa atau gramatika yang jika dikuasai memungkinkan seseorang dapat menggunakan bahasa itu; sedangkan performansi merupakan tindak berbahasa nyata yang didasarkan pada kompetensi dan dipengaruhi oleh faktor non linguistik, seperti: situasi, topik, partisipan, dan lain-lain (Nababan, 1987:1). Dikotomi Chomsky ini linier dengan dikotomi *langue* dan *parole* yang dikembangkan oleh Saussure (1988). *Langue* merupakan kaidah sebagai milik bersama (komunal) satu masyarakat bahasa. *Langue* bersifat sistematis dan relatif statis, yang melandasi pemroduksian dan pemahaman kalimat; sedangkan *parole* merupakan perwujudan *langue* yang bersifat individual dan dinamis. Sifat individual dan dinamis inilah yang menyebabkan setiap penutur suatu bahasa dapat memroduksi ujaran secara bervariasi sesuai dengan situasi pertuturan yang secara aktual dialami. Setiap orang dapat ‘menyimpang’ dari gramatika; dan petutur mengerti maksud penutur. Fakta linguistik terakhir inilah yang sering ‘gagal’ dijelaskan oleh kajian linguistik mikro yang fokus pada aspek gramatikal. ‘Kegagalan’ itu disebabkan karena tidak setiap orang selalu mengatakan apa yang dia maksudkan secara eksplisit. Penutur sering kali

bermaksud lebih luas daripada kata-kata yang secara nyata diucapkannya (Thomas, 1995), seperti contoh berikut ini.

- Konteks : Orang tua menasihati anaknya yang akan bersekolah di kota lain.
Orang tua : *Melahang ngaba raga* 'Baik-baiklah bawa diri!'

Ujaran orang tua di atas hanya menggunakan tiga kata, tetapi maksudnya sangat luas, antara lain belajar yang tekun dan rajin; hati-hati bergaul; selalu ingat sembahyang, sopan-santun di daerah orang lain; berhematlah, dan lain-lain. Sebaliknya, sangat sering pula seseorang bermaksud lebih sempit daripada kata-kata yang dikatakannya, seperti contoh berikut ini.

- Konteks : Pedagang obat kaki lima di pasar.
Penjual obat : *Ida dane sareng sami, durus tampekin mriki. Niki titiang makta ubad penyakit kulit, sane sida nambanin bulenen, kurap, kadas, gatel-gatel mwah penyakit kulit tiosan. Titiang makta wantah akidik, dadosne madumun-dumunan. Sira sane dumunan punika sane aturin titiang. Titiang nunas ampura sareng Ida dane sane ten prasida aturin titiang. Indikpangarga, wantah jinah alit Rp20.000,00* 'Saudara sekalian, silakan mendekati ke sini. Ini, saya membawa obat penyakit kulit, yang bisa mengobati panu, kurap, kadas, gatal-gatal dan penyakit kulit lainnya. Saya membawa hanya sedikit, sehingga siapa cepat dia dapat. Siapa pun yang lebih dahulu, dia yang saya berikan. Saya mohon maaf kepada yang tidak mendapatkannya. Mengenai harga, hanya uang kecil, Rp20.000,00'

Ujaran penjual obat di atas terdiri dari 54 kata yang dikemas menjadi 6 kalimat. Cukup banyak kata yang diucapkannya, tetapi maksudnya sangat singkat, yakni 'belilah obat ini'. Persoalannya adalah, bagaimana gramatika bahasa Bali dapat digunakan untuk menjelaskan fakta kebiasaan seperti itu?

Berdasarkan fenomena penggunaan bahasa, fakta linguistik tidaklah bersifat dikotomis, bentuk - makna, seperti itu. Ditemukan banyak data linguistik yang menunjukkan

bahwa identifikasi bahasa berdasarkan bentuk dan makna belumlah tuntas. Ada banyak data yang menguatkan rumusan ini, yang menunjukkan bahwa sering terjadi perbedaan antara bentuk kalimat dengan representasi makna dan fungsinya. Contoh, seorang mengatakan “Terjadi kemacetan parah di Jalan Gatot Subroto”. Ujaran tersebut berbentuk kalimat berita atau pernyataan, yang secara sintaksis untuk menginformasikan sesuatu kepada petutur. Namun demikian, penutur tidaklah semata-mata sekadar menginformasikan kemacetan yang terjadi, tetapi menyarankan agar patutur menghindari Jalan Gatot Subroto. Dalam bahasa Bali pun fenomena linguistik seperti itu sering terjadi; misalnya seseorang anak mengatakan “*Pa, lengis montore telah* ‘Pak, bensin motornya habis’. Ujaran ini pun merupakan kalimat berita, tetapi penutur tidak sekadar bermaksud menginformasikan bahwa bensin motornya habis, tetapi mungkin bermaksud mengingatkan agar Bapak tidak lupa membeli bensin atau minta uang untuk membeli bensin, bahkan mungkin penutur menolak disuruh pergi, atau bisa saja bermaksud lain yang masih terbuka sesuai dengan konteksnya. Fakta linguistik seperti tersebut menunjukkan bahwa ada dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam pengkajian bahasa. Dimensi inilah yang disebut kajian pragmatik.

Kajian pragmatik mulai dikembangkan pada pertengahan abad ke-20 untuk menjembatani penjelasan bentuk-bentuk kalimat yang anomali, yakni kalimat yang ‘melanggar’ kaidah gramatika, tetapi tetap, bahkan sering digunakan dalam berbahasa. Aplikasi teori pragmatik dalam kajian bahasa Bali relatif masih jarang dilakukan; padahal banyak fakta lingual yang tidak dapat dijelaskan secara tuntas dengan kaidah gramatikal yang ada. Penelitian ini diharapkan mengisi kekosongan itu dan menumbuhkan minat linguistik mengkaji aspek pragmatik bahasa Bali.

Pragmatik berkaitan dengan banyak hal tentang penggunaan bahasa. Namun demikian, penelitian ini difokuskan pada tiga hal pokok, yakni: tindak ujar bahasa Bali, prinsip kerja sama dan kesantunan, serta parameter pragmatik. Tindak ujar merupakan unsur sentral penggunaan bahasa, tidak terkecuali

dalam bahasa Bali. Tindak ujar merupakan representasi keterampilan penutur dalam memetakan kaidah bahasa dan sosial. Pelibatan kaidah sosial dalam bertindak ujar berimplikasi pada perspektif kesantunan untuk mempertahankan kerja sama, yang efektivitasnya diukur berdasarkan parameter pragmatik dalam bahasa Bali.

Bahasa Bali merupakan salah satu bahasa daerah besar, karena memiliki penutur melebihi satu juta orang yang tersebar di Provinsi Bali, Lombok Barat, dan daerah transmigrasi asal Bali, seperti Provinsi Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan lain-lain. Selain digunakan secara lisan, bahasa Bali pun digunakan secara tertulis, baik dengan menggunakan huruf Latin maupun aksara Bali. Salah satu dokumen penggunaan bahasa Bali adalah *awig-awig* desa *pakraman*.

Desa pakraman merupakan lembaga adat yang otonom. Dikotomi kelembagaan desa di Bali sudah berlangsung berabad-abad, sehingga sudah menjadi pola pokok organisasi sosial. Pola organisasi masyarakat Bali dilembagakan menjadi desa dinas dan desa *desa pakraman*. Desa dinas merupakan lembaga administrasi vertikal, sehingga pola-pola hubungan sosial kemasyarakatannya diatur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara/pemerintah. Dalam pelaksanaan pemerintahannya, desa dinas menggunakan pengantar bahasa Indonesia, sebagai bahasa resmi negara. Tidak demikian halnya dengan *desa pakraman*. *Desa pakraman* merupakan organisasi sosial yang berlatar belakang adat dan budaya Hindu. *Desa pakraman* merupakan organisasi sosial otonom sehingga pola-pola hubungan ditetapkan bersama yang dituangkan dalam bentuk *awig-awig* 'undang-undang desa'. Penjelasan yang lebih rinci terkait dengan *awig-awig* dapat dituangkan dalam *perarem* 'kesepakatan'. Oleh karena itu, *perarem* merupakan bagian integral dari *awig-awig*. *Awig-Awig* dan *perarem* inilah yang menjadi acuan pokok dalam menatalaksanakan organisasi desa *pakraman*. *Awig-awig* dan *perarem* ditulis menggunakan bahasa dan (aksara) Bali yang selanjutnya *dipasupati* 'sagralkan melalui proses ritual'.

Penggunaan bahasa Bali untuk menulis *awig-awig* dan *perarem* merupakan implementasi kebijakan politik bahasa nasional yang menetapkan kedudukan bahasa-bahasa lokal sebagai bahasa daerah. Kebijakan politik bahasa nasional itu ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Selain itu, penggunaan bahasa Bali dalam *awig-awig* dan *perarem* juga mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali (sebagai perubahan dari Perda Nomor 3 Tahun 1992). Dalam pasal 1 angka 7 dari peraturan daerah tersebut ditegaskan bahwa bahasa Bali adalah bahasa daerah yang digunakan oleh orang Bali dan penutur lainnya, yang dipelihara dan dikembangkan sebagai pengemban kebudayaan Bali dan tata kemasyarakatan Bali. Selanjutnya, pada pasal 6 huruf d ditegaskan bahwa fungsi bahasa Bali sebagai media yang digunakan dalam *desa pakraman*, *banjar adat*, dan *lembaga adat* lainnya. *Awig-awig* merupakan salah satu produk hukum *desa pakraman* sehingga bahasa Bali wajib digunakan. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, bahasa Bali memiliki fungsi yang sangat penting dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal yang dibingkai oleh norma adat.

Secara umum, masyarakat *desa pakraman* sangat tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam *awig-awig*. Pelanggaran *awig-awig* oleh warga *desa pakraman* sangat jarang terjadi. *Awig-awig* membuat ikatan komunal dan kelembagaan *desa pakraman* menjadi sangat kuat. Oleh sebgaaian besar warga *desa pakraman*, pengingkaran *awig-awig* dan *perarem* dipandang sebagai kesalahan yang sangat perlu dihindari. *Awig-awig* dan *perarem* telah berhasil menghegemoni warga *desa pakraman*. Dalam ikatan *desa pakraman* ini, tampaknya ada hubungan hegemoni sosial dengan penggunaan varian bahasa Bali yang dinilai santun. Oleh karena itu, melalui penelitian ini ingin dijustifikasi varian-varian bahasa Bali yang berhasil digunakan membangun hegemoni sosial dalam masyarakat *desa pakraman*.

Kesantunan hegemonis merupakan konstruksi penggunaan variasi bahasa Bali yang menempatkan warga *desa*

pakraman sebagai petutur pada posisi yang lebih terhormat. Penghargaan terhadap posisi sosial ini memberikan perlakuan pragmatis yang positif pada warga desa *pakraman* sebagai petutur. Kesantunan hegemonis tampaknya dapat diwujudkan dengan berbagai instrumen linguistik, seperti diksi, struktur kalimat dan pemerkah- pemarkah lingual lainnya. Penelitian ini diarahkan untuk mengungkap fakta-fakta linguistik tersebut. Pengungkapan fakta linguistik ini memiliki nilai strategis fungsional untuk memelihara harmoni sosial.

1.2 Masalah Penelitian

Paparan latar belakang di atas menggambarkan ke-signifikan penggunaan bahasa untuk membangun harmoni sosial dalam satuan komunitas tertentu. Namun demikian, variabel- variabel pragmatisnya belum dijelaskan secara ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada masalah berikut ini.

1. Tindak ujar apakah yang umumnya digunakan untuk mengungkapkan kesantunan hegemonis bahasa Bali dalam *awig-awig* desa *pakraman*?
2. Prinsip kerja sama dan maksim kesantunan manakah yang diimplementasikan dalam *awig-awig* desa *pakraman*?
3. Paramater pragmatis apakah yang dominan digunakan dalam *awig-awig* desa *pakraman*?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini ingin mengembangkan teori pragmatik berdasarkan data penggunaan bahasa Bali dalam *teks awig-awig* desa *pakraman*. Pengembangan teori pragmatik yang dimaksud adalah pengungkapan pilihan konstruksi linguistik untuk menyatakan kesantunan hegemonis bahasa Bali. Pengungkapan konstruksi linguistik ini diharapkan dapat membuktikan bahwa terdapat relasi kuat antara kajian pragmatik dengan gramatikal, yang selama ini cenderung dipisahkan oleh para peneliti linguistik. Selain itu, penelitian ini pun ingin membuktikan bahwa pilihan konstruksi linguistik

dapat digunakan untuk membangun hegemoni sosial secara internal, yang selama ini diabaikan.

1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian

Mengacu pada permasalahan penelitian di atas, tujuan khusus penelitian ini dapat dirinci seperti berikut ini.

1. Mendeskripsi dan mengeksplanasi tindak ujar yang digunakan untuk mengungkapkan kesantunan hegemonis bahasa Bali dalam *awig-awig desa pakraman*.
2. Mengungkapkan prinsip kerja sama dan maksim kesantunan yang diimplementasikan dalam *awig-awig desa pakraman*.
3. Mengeksplanasi paramater pragmatik dominan yang digunakan dalam *awig-awig desa pakraman*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menjadi bagian dari pembangunan sosial dan humaniora yang diarahkan untuk menciptakan harmoni sosial. Harmoni sosial dapat diwujudkan apabila terdapat ikatan kebersamaan. Salah satu ikatan sosial yang ada di Provinsi Bali adalah *desa pakraman*. Kokohnya *desa pakraman* di Bali disebabkan ketaatan warga terhadap *awig-awig* yang disusun dengan menggunakan bahasa dan (aksara) Bali serta memperhatikan kerja sama dan kesantunan pragmatik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori hegemoni Gramsci serta dapat menciptakan *role model* penggunaan bahasa daerah untuk membangun dan memperkuat lembaga sosial adat yang hingga saat ini eksistensinya masih nyata dalam masyarakat Nusantara. Penelitian ini pun diharapkan sebagai upaya konkret revitalisasi bahasa daerah sebagai identitas etnis yang memperkaya khazanah budaya nasional Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Rancangan Penelitian

Kajian ini dirancang dengan desain penelitian kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif adalah memberikan penjelasan atas fenomena yang diteliti. Penekanan diberikan pada aspek

pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Untuk mewujudkan tujuan itu dilakukan *indepth analysis* (Sumanto, 1995). Penelitian kualitatif menempatkan setiap data sebagai sesuatu yang bermakna. Terkait dengan penelitian ini, fenomena yang ingin dijelaskan adalah konstruksi linguistik kesantunan hegemonis bahasa Bali dalam *awig-awig*.

1.5.2 Sumber Data

Data penelitian ini bersumber dari *awig-awig* desa pakraman dan informan. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, terdapat 1.488 desa pakraman di seluruh Bali yang tersebar pada sembilan kabupaten dan kota. Struktur organisasi desa pakraman berjenjang dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa adat (*pakraman*). Di tingkat provinsi, desa adat diorganisasi oleh Majelis Utama Desa *Pakraman* (MUDP). Di tingkat kabupaten, desa adat diorganisasi oleh Majelis Madya Desa *Pakraman* (MMDP). Di tingkat kecamatan diorganisasi oleh Majelis *Alit* Desa *Pakraman* (MADP) dan di tingkat desa pakraman diorganisasi oleh *bendesa*. Berdasarkan data jumlah desa pakraman dan struktur organisasi yang ada, sumber data penelitian ini ditetapkan secara *non random sampling*. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *areal sampling* (Marzuki, 1986:50). Dari 9 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali, diambil 5 kabupaten/kota sebagai sampel penelitian. Kelima kabupaten/kota itu adalah seperti berikut ini.

1. Kabupaten Karangasem mewakili daerah Bali bagian timur.
2. Kabupaten Gianyar mewakili daerah Bali bagian tengah.
3. Kota Denpasar mewakili daerah Bali bagian selatan.
4. Kabupaten Jembrana mewakili daerah Bali bagian barat.
5. Kabupaten Buleleng mewakili daerah Bali bagian utara

Pemilihan Kabupaten Karangasem dilatarbelakangi kondisi empirik bahwa masyarakat daerah ini sangat taat azas pada penggunaan *anggah-ungguhing* basa Bali. Pemilihan Kabupaten Gianyar disebabkan karena masyarakat kabupaten ini sangat konsisten melestarikan seni dan budaya yang diwadahi dengan bahasa Bali. Kota Denpasar dipilih sebagai sampel karena

masyarakatnya sangat heterogen yang diyakini berpengaruh pada penggunaan bahasa Bali. Kabupaten Jembrana berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Kedekatan dua daerah itu menyebabkan terjadinya mobilitas penduduk dan kontak bahasa, yang diyakini berpengaruh pada variasi penggunaan bahasa Bali; sedangkan pemilihan Kabupaten Buleleng sebagai sampel penelitian karena dialek bahasa Bali Singaraja dinyatakan sebagai bahasa baku. Data penggunaan bahasa Bali dalam *awig-awig*, ditriangulasi dengan menggunakan informan. Informan penelitian ditetapkan secara *purposive sampling* dengan kriteria: (1) terampil berbahasa Bali, (2) memahami adat dan budaya, (3) memahami *awig-awig* yang berlaku di desa *pakraman*-nya.

1.5.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang bersumber dari *awig-awig* dikumpulkan dengan menggunakan metode pencatatan dokumen (dalam penelitian ini, *awig-awig* merupakan dokumen autentik). Teknik yang diterapkan adalah teknik dasar sadap dan teknik lanjutan catat (Mashun, 2005:116). Selanjutnya, data dari informan dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) yang secara semi terstruktur. Dalam hal ini, disiapkan pedoman wawancara, namun dilapangan *interviewer* dapat dikembangkan secara situasional.

1.5.4 Metode dan Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dielisisasi dan diklasifikasi untuk mendapatkan kategori korpus inti yang dijadikan pijakan analisis. Korpus inti dianalisis dengan metode padan ekstralingual, dengan teknik dasar hubung banding ekstralingual (Mashun, 2005:120). Secara operasional, teks *awig-awig* dipilah menjadi unit satuan berupa klausa atau kalimat. Setiap unit data dilakukan hubung banding menyamakan dan hubung banding membedakan dengan faktor penentu pemakai dan pemakaian bahasa. Dalam beberapa kasus tertentu, juga digunakan teknik ganti. Dengan penerapan kedua teknik analisis ini diharapkan kesantunan hegemonis pada *awig-awig* dapat dikarakterisasi.

BAB II

KONSEP, KAJIAN PUSTAKA, DAN TEORI

2.1 Konsep

Konsep merupakan abstraksi tentang sesuatu atau peristiwa sehingga diperoleh pengertian. Konsep dibutuhkan untuk memperoleh pemahaman yang sama tentang sesuatu. Terkait dengan penelitian ini, ada beberapa konsep yang perlu dijelaskan, yakni: kesantunan bahasa, hegemoni, desa *pakraman*, *awig-awig*, dan, anggah-ungguhing basa Bali.

(1) Kesantunan Berbahasa

Kesantunan berbahasa terakit dengan penggunaan bahasa yang banyak dikaji dalam pragmatik. Kesantunan merupakan sebuah perspektif pelaksanaan tindak berbahasa (*speech acts*). Secara spesifik, kesantunan berbahasa terkait dengan jarak sosial partisipan; oleh karena itu sebuah konstruksi ujaran bisa dianggap santun atau tidak tergantung pada hubungan sosial antarpartisipan. Namun demikian, melampaui hubungan antarpribadi, terdapat nilai sosial yang mengikat sebuah masyarakat. Sebagai sebuah kajian, kesantunan berbahasa diarahkan kepada tatanilai penggunaan bahasa dalam suatu masyarakat sehingga diperoleh simpulan yang generik.

(2) Hegemoni

Hegemoni merupakan terminologi sosial. Secara sederhana hegemoni dapat dipadankan dengan ketaatan atau ketertundukan warga atas dominasi atau kepemimpinan atau kekuasaan. Dalam hal telah terjadi hegemoni, sesungguhnya terdapat pula hierarki sosial yang tumbuh sebagai wujud kesepakatan, bukan keterpaksaan. Hierarki sosial itu bisa bersifat individual, kelompok, maupun kelembagaan. Hegemoni merupakan kerelaan yang membiarkan kekuasaan berjalan

melalui persetujuan dengan menanamkan ideologi.

(3) Desa *Pakraman*

Di Bali terdapat dua jenis desa. Pertama, desa (dinas) yang dipimpin oleh *perbekel* atau kepala desa. Desa dinas bertugas mengurus administrasi pemerintahan. Kedua, desa *pakraman* (sebelumnya disebut desa adat). Desa *pakraman* mengurus hal-hal yang berkaitan dengan adat dan agama Hindu. Desa *pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tatakrama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagai pemerintahan lokal yang dikembangkan secara turun-temurun, desa pakraman mengemban misi utama pelestarian dan pengembangan tradisi lokal sebagai identitas budaya Hindu.

(4) *Awig-Awig*

Awig-awig merupakan istilah hukum adat Bali. *Awig-awig* dapat diartikan sebagai hukum adat yang berlaku pada suatu desa *pakraman*. Sebagai hukum adat, *awig-awig* wajib ditaati oleh *krama* 'warga' desa *pakraman* yang didalamnya diatur tentang: (a) *parahyangan* yang menata tempat suci umat Hindu serta relasi manusia dengan Ida Hyang Widhi, (b) *pawongan* yang menata hubungan dan keharmonisan antarmanusia, dan (c) *palemahan* yang mengatur penataan lingkungan alam. Ketiganya diyakini sebagai kesatuan sumber keharmonisan hidup yang disebut *tri hita karana*.

(5) *Anggah-Ungguhing* Basa Bali

Istilah *anggah-ungguhing* digunakan untuk menggantikan *sor-singgih basa* Bali, yang identik dengan tingkatan bahasa (*speech levels*). *Anggah-ungguhing basa* merupakan bidang kajian sosiolinguistik, yang menganalisis relasi variasi bahasa dengan variabel sosial kemasyarakatan penuturnya. Variasi

bahasa mencerminkan berperannya variabel sosial. Artinya, variabel sosial sebagai penjelas pemunculan variasi bahasa. Terkait dengan realitas sosiolinguistik itu, secara umum, dalam bahasa Bali terdapat tiga tingkatan pokok, yakni varian bahasa Bali *alus* 'hormat', bahasa Bali *kepara* 'lumrah, umum', dan bahasa Bali *andap* 'rendah'. Varian bahasa Bali *alus* memiliki tiga subvarian, yakni: *alus singgih* 'hormat-tinggi', *alus madya* 'hormat-menengah', dan *alus sor* 'hormat-bawah'. Setiap variasi bahasa Bali dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.

2.2 Kajian Pustaka

Untuk memepertegas posisi penelitian 'Kesantunan Hegemonis Bahasa Bali dalam *Awig-Awig* Desa *Pakraman*' berikut ini disampaikan beberapa penelitian terkait.

Gunarwan (1992) menulis artikel 'Persepsi Kesantunan Direktif di dalam Bahasa Indonesia di antara Beberapa Kelompok Etnik di Jakarta'. Fokus kajian ini terletak pada relasi modus ujaran direktif dengan derajat kesantunan. Kontribusi penting dari artikel ini terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah keparalelan antara modus direktif dengan konstruksi teks pada *awig-awig*. Keparalelean ini terjadi karena hakikat *awig-awig* adalah 'mengatur' atau mendirektif warga desa *pakraman*. Konsep Gunarwan yang dapat diacu untuk penelitian ini adalah penekanan pembedaan antara kepantasan dan kesantunan. Kepantasan dipandang sebagai relasi antara penyuruh dengan pesuruh yang situasional sedangkan kesantunan adalah adanya kebutuhan dua pihak akan kejelasan pragmatik yang tidak memaksa. Dalam artikel ini, Gunarwan menegaskan bahwa semakin tidak langsung sebuah tuturan direktif, semakin tinggi derajat kesopanannya. Simpulan Gunarwan tersebut akan diverifikasi melalui penelitian yang berjudul 'Kesantunan Hegemonis Penggunaan Bahasa Bali dalam *Awig-Awig* Desa *Pakraman*' ini mengingat dalam *awig-awig* tidak diberikan ruang untuk menggunakan tindak tutur tidak langsung. Ketiadaan ruang penggunaan tindak tutur tidak langsung dalam *awig-awig* dimungkinkan penggunaan piranti lain untuk menyatakan

kesantunan hegemonis.

Jendra (1999) mempublikasikan hasil kajiannya melalui 'Etika Berbicara dalam Sastra Hindu: Analisis Religiosiolinguistik'. Jendra mengatakan bahwa etika berbahasa didasarkan pada konsep *desa* 'tempat', *kala* 'waktu', dan *patra* 'keadaan'. Instrumen linguistik yang digunakan adalah eufemisme. Kajian Jendra ini perlu diverifikasi mengingat *awig-awig* disusun melampaui batas tempat, waktu dan keadaan. *Awig-awig* disusun untuk kurun waktu yang (relatif) lama. *Awig-awig* digunakan sebagai acuan adat dari generasi ke generasi sehingga 'hampir' terbebas dari ikatan *desa, kala, patra* tersebut.

Aziz (2003) menulis artikel 'Realisasi Kesantunan Berbahasa Antargenerasi dalam Masyarakat Indonesia'. Fokus artikel ini adalah hubungan antara bahasa dan usia. Aziz menyakini bahwa usia memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan perilaku berbahasa seseorang. Ditegaskan perbedaan usia penutur sangat berpengaruh terhadap pola realisasi pertuturan yang dibuat. Disimpulkan ada perbedaan yang sangat mencolok pada relasi kesantunan berbahasa yang ditunjukkan oleh kelompok generasi yang berbeda. Perbedaan perilaku kesantunan berbahasa dari kelompok usia yang berbeda timbul karena adanya hasrat yang berbeda dari setiap kelompok usia. *Awig-awig* sebagai produk hukum adat Bali mengikat semua warga adat lintas usia sehingga pemilihan instrumen kesantunan hegemonis dalam *awig-awig* dipastikan mengabaikan variabel usia tersebut. Untuk mengungkapkan variabel-variabel dominan dalam penentuan pola kesantunan hegemonis dalam *awig-awig*, penelitian ini dilakukan.

Simpen (2008) telah melaporkan hasil penelitiannya tentang 'Sopan Santun Berbahasa Masyarakat Sumba Timur'. Fokus penelitian ini adalah penggunaan bahasa Kambera untuk fungsi-fungsi umum. Melalui penelitian ini diungkapkan bahwa masyarakat penutur bahasa Kambera mewujudkan kesantunan melalui dua cara, yaitu verbal dan nonverbal. Kesantunan verbal diwujudkan dalam bentuk kata, gabungan kata, kalimat, dan peribahasa. Kesantunan verbal diwujudkan melalui

speech acts sedangkan kesantunan nonverbal berwujud: cara berpakaian, cara makan, gerakan tubuh, perbuatan sumbang, serta memermalukan orang lain. Kesantunan dalam bahasa Kambera dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni status, usia, hubungan kekerabatan. Mencermati laporan penelitian Simpen (2008) ini terungkap bahwa fungsi spesifik bahasa, seperti fungsi hegemonis, belum tersentuh. Kajian kesantunan fungsi spesifik penting diungkapkan mengingat selalu ada hubungan konstruksi linguistik dengan fungsi spesifik tersebut.

Arnawa (2014) melaporkan hasil penelitian tentang 'Penggunaan Pemarkah Negatif dalam Ujaran : Strategi Kesantunan dalam Berbahsa Bali'. Melalui penelitian ini diungkapkan permarkah negatif (*negative mark*) tidak selalu 'bermakna' negatif dalam kehidupan sosial. Permarkah negatif, dalam banyak budaya, justru mencerminkan nilai positif. Dalam bahasa Bali, penggunaan pemarkah negatif dinilai sebagai kesantunan dalam berbahasa sebagai cermin karakter penuturnya. Meskipun demikian, dalam penelitian ini belum diungkapkan pola-pola kesantunan hegemonis yang digunakan pada *awig-awig*. Sebagai produk hukum adat, teks *awig-awig* memiliki ciri kebahasaan yang spesifik sehingga pola-pola kesantunannya sangat mungkin berbeda dengan pola ujar pada umumnya.

Arnawa (2016) melaporkan hasil penelitian tentang 'Interpretasi Pragmatis Analogis Metafora Bahasa Bali'. Fokus penelitian ini adalah klasifikasi semantis metafora bahasa Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pola-pola interpretasi implikatur metafora. Untuk itu, penelitian ini berpijak pada teori semantik dan pragmatik. Penelitian ini dirancang dalam desain entografi komunikasi. Data dikumpulkan dari penggunaan metafora dalam berbagai ranah lisan dan tertulis. Data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa secara semantis, metafora bahasa Bali didominasi oleh jenis kongkret - abstrak dengan tingkat tensional yang cukup tinggi. Implikatur metafora didesain melalui dua pola analogi, yaitu analogi logis dan analogi

deklaratif. Penggunaan metafora dilatarbelakangi oleh prinsip kooperatif dan kesantunan. Berdasarkan studi pendahuluan, kesantunan metaforis tidak dapat diterapkan pada kesantunan hegemonis dalam *awig-awig* karena karakteristik teks *awig-awig* tidak memberikan cukup ruang penggunaan konstruksi metaforis. Oleh karena itu, konstruksi kesantunan hegemonis dalam *awig-awig* penting dieksplanasi.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaparkan di atas maka *state of the arts* penelitian ini adalah mendeskripsi, mengeksplanasi pola ujar kesantunan hegemonis yang digunakan dalam *awig-awig* desa *pakraman* di Bali yang hingga kini luput dari kajian para linguis. Fenomena utama yang akan diungkap melalui penelitian ini adalah adanya hubungan kausalitas antara variasi bahasa yang digunakan dengan ketaatan warga desa *pakraman* terhadap *awig-awignya*. Kajian ini menjadi unik dan penting karena sangat jarang ada warga desa *pakraman* yang (sengaja) melanggar *awig-awignya* jika dibandingkan dengan pelanggaran ketentuan kedinasan lainnya.

2.3 Konstruksi Teori

Penelitian 'Kesantunan Hegemonis Penggunaan Bahasa Bali dalam *Awig-Awig* Desa *Pakraman*' ini menggunakan teori pragmatik sebagai pijakan utama. Untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif, kajian ini didukung oleh teori semantik dan sosiolinguistik.

Konsep-konsep pragmatik yang relevan dengan penelitian ini adalah prinsip-prinsip kerja sama (*cooperative principles*) dan prinsip-prinsip kesantunan (*politeness principles*). Prinsip kerja sama ini dikembangkan oleh Grice (dalam Nababan, 1987: 31). Prinsip kerja sama tersebut diturunkan menjadi empat maksim, yakni: kuantitas, kualitas, hubungan, dan cara. Keempat maksim tersebut dijabarkan lebih rinci menjadi aturan-aturan khusus. Pengacuan prinsip kerja sama ini dilatari pemikiran bahwa *awig-awig* merupakan acuan kerja sama kolektif.

Konsep pragmatik lain yang juga diacu karena memiliki relevansi tinggi dengan penelitian ini adalah prinsip kesantunan

(*politeness principles*) yang dikembangkan oleh Leech (1983: 131). Dalam konsep ini dikembangkan enam maksim, yaitu maksim kearifan, kedermawanan, pujian, kerendahan hati, kesepakatan, dan kesimpatian. Setiap maksim tersebut dikembangkan menjadi aturan khusus.

Perspektif semantik dimaksudkan untuk menegaskan adanya perbedaan representasi pragmatis dengan representasi semantis dari varian tutur yang digunakan pada *awig-awig*. Meskipun ada perbedaan representasi, kajian pragmatik memiliki hubungan yang sangat erat dengan kajian semantik. Pragmatik menelaah maksud ujaran dengan mempertimbangkan konteks, sedangkan semantik menelaah makna konstruksi linguistik bebas konteks (Wijana, 1996). Atas kaitan tersebut Soemarmo (1988) mengatakan pragmatik merupakan telaah makna yang tidak dapat dijelaskan dengan teori semantik.

Perspektif sosiolinguistik dimaksudkan sebagai landasan penjelas terhadap dua hal. Pertama, hubungan bahasa dengan kekuasaan yang merupakan instrumen penting pada proses hegemoni sosial (Thomas dan Warieng, 2007; dan Latif dan Ibrahim, 1996). Hubungan bahasa dan kekuasaan ini dirangkai dengan konsep hegemoni yang dikembangkan oleh Gramsci (Patria dan Arief, 2015). Kedua, Latar pilihan varian bahasa Bali yang digunakan dalam *awig-awig*. Perspektif sosiolinguistik ini dibutuhkan karena secara faktual penulisan *awig-awig* menggunakan bahasa Bali ragam *alus singgih* 'ragam sangat hormat' yang sering berbeda dengan ragam bahasa sehari-hari (*ordinary language*). Ragam *alus singgih* merupakan salah satu varian bahasa Bali pada sistem *angguh-ungghing basa* 'tingkatan bahasa'. Kajian tingkatan bahasa (*speech levels*), yang merupakan bagian dari teori sosiolinguistik diharapkan dapat memperjelas konstruksi kesantunan penggunaan bahasa Bali dalam *awig-awig*.

Untuk memperjelas posisi teori yang digunakan, berikut ini divisualkan benang merah acuan teoretis sebagai kerangka berpikir penelitian.

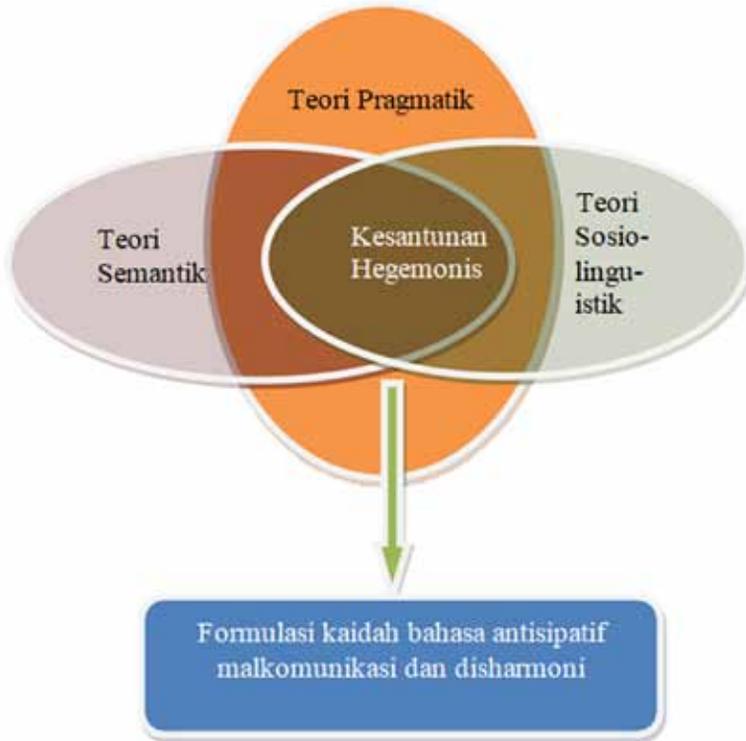


Diagram 1. Formulasi Kerangka Teori

BAB III

KARAKTERISTIK BAHASA BALI DALAM AWIG-AWIG

Pada bab ini diuraikan (1) eksistensi dan struktur dasar *awig-awig* desa *pakraman*, (2) pembinaan bahasa Bali, (3) jenis tindak tutur bahasa Bali dalam *awig-awig* desa *pakraman*, (4) kesantunan hegemonis penggunaan bahasa Bali dalam *awig-awig*. dan (5) temuan dan pembahasan. Kelima hal tersebut diuraikan satu per satu berikut ini.

3.1 Eksistensi dan Struktur *Awig-Awig* Desa *Pakraman* di Bali

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan hingga tahun 2017 terdapat 1.488 desa *pakraman* di seluruh Bali yang tersebar pada sembilan kabupaten dan kota. Jumlah ini dimungkinkan bertambah karena setiap desa *pakraman* dapat dimekarkan menjadi beberapa desa *pakraman* baru. Istilah desa *pakraman* mulai dikukuhkan sejak ditetapkannya Perda Nomor 3 Tahun 2001, sebelumnya digunakan istilah desa adat. Oleh karena itu, masih sering ditemukan penggunaan istilah desa *adat* dan desa *pakraman* secara bergantian, dengan maksud yang sesungguhnya sama.

Desa *pakraman* merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tatakramapergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurundalamikatan*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri". Kewenangan mengurus rumah tangga sendiri mewajibkan setiap desa *pakraman* memiliki aturan (hukum) khusus yang dijadikan pedoman menatalaksanakan kehidupan masyarakatnya. Aturan khusus yangdibuat dan berlaku untuk suatu desa *pakraman* disebut

awig-awig; yakni aturan yang dibuat oleh *krama* desa *pakraman* dan/atau *krama* banjar *pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *tri hita karana* sesuai dengan desa *mawacara* dan *dharma* agama di desa *pakraman* dan/atau banjar *pakraman* masing-masing (pasal 1, ayat 11). *Awig-awig* desa *pakraman* ini disusun menggunakan bahasa Bali.

Surpa (2004) menjelaskan bahwa desa *pakraman* dipandang sebagai lembaga sosial religius berdasarkan agama Hindu. Meskipun demikian, desa *pakraman* tidaklah eksklusif dengan desa dinas dan kelurahan. Jika desa *pakraman* lebih menatalaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan adat dan agama, maka desa dinas dan kelurahan lebih fokus pada administrasi pemerintahan. Dengan demikian, kedudukan desa *pakraman* dengan desa dinas dan kelurahan dapat dikatakan berkomplementer dengan tugas dan fungsinya berbeda. Antara desa dinas dan kelurahan di satu pihak dengan desa *pakraman* di pihak lain terbangun koordinasi yang saling melengkapi. Sesuai dengan fungsinya, desa *pakraman* diselenggarakan dengan berpedoman pada falsafah Hindu Tri Hita Karana, yakni membangun ketaqwaan umat manusia dengan Ida Hyang Widhi (Tuhan Yang Mahaesa), membangun hubungan manusia dengan manusia (sosiologis), dan membangun hubungan manusia dengan alam dengan segala isisnya (pelestarian ekologis). Bukti empirik yang mendukung filosofi ini tercermin dari arsitektur tradisional Bali, kesenian, dan kebudayaan pada umumnya.

Dalam perkembangannya, desa *pakraman* mengalami transformasi hierarkis. Tujuannya untuk membangun sinergi antardesa *pakraman* yang ada di Bali. Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2001 ditetapkanlah hierarki kelembagaan yang membantu mengembangkan desa *pakraman*. Di tingkat provinsi dibentuk Majelis Utama Desa *Pakraman* (MUDP). Di tingkat kabupaten/kota dibentuk Majelis Madya desa *Pakraman* (MMDP). Di tingkat kecamatan dibentuk Majelis *Alit* desa *pakraman* (MADP). Tingkat ujung tombak adalah desa *pakraman* yang diorganisasi oleh *bendesa* (ketua). Hubungan lembaga-lembaga itu bersifat koordinasi dan pembinaan. Sebagai sebuah

lembaga adat terkecil, desa *pakraman* memiliki otonomi.

Sebagai lembaga adat yang mempunyai otonomi, desa *pakraman* memiliki struktur organisasi untuk megembangkan eksistensinya. Desa *pakraman* dipimpin oleh satu orang *bendesa* atau *kelihan* desa adat (ketua adat) yang dibantu oleh prajuru yang lain. Penggunaan istilah *bendesa* didasarkan pada etimologinya. Kata *bendesa* berasal dari akar kata *banda* 'tali pengikat' dan *desa* 'warga'. Dengan demikian, *bendesa* diharapkan dapat menyatukan warga dengan rasa kekeluargaan, saling asah, asih, dan asuh; *sagilik, saguluk, salunglung sabayantaka*. Oleh karena tugas *bendesa* atau *kelihan* adat sangat berat dan mulia, maka ketika pemilihannya sangat bertumpu pada kepribadian (*personality*), pemahaman adat dan budaya, dan pemahaman tentang yadnya (upacara Hindu), serta pengetahuan lain yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan.

Untuk memudahkan komunikasi dengan seluruh krama, dibuatlah beberapa banjar yang merupakan bagian integral dari *desapakraman*. Setiap banjar adat dipimpin oleh satu orang *kelihan* banjar. Apabila wilayah suatu banjar masih cukup luas, dibuatlah *tempekan* yang dipimpin oleh satu orang *kelihan* tempek. Nama *tempekan* umumnya ditetapkan sesuai dengan arah mata angin: *tempekan kaja* 'utara', *tempekan kelod* 'selatan', dan seterusnya.

Sesuai kedudukannya, desa *pakraman* mengemban fungsi utamasebagai pelestari adat-istiadat dan budaya luhur yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pewarisan adat-istiadat dan budaya secara turun-temurun membuktikan bahwa keluhuran adat dan budaya tersebut telah teruji secara empirik dan diakronis. Kebertahanan adat dan budaya itu terkait erat dengan persepsi masyarakat Bali. Oleh masyarakat Bali, pengingkaran adat dan budaya dipandang sebagai perbuatan tercela yang dapat mengganggu keseimbangan kosmos, buana agung dan buana alit (Surpha, 2003:16). Persepsi krama Bali tersebut tetap bertahan hingga saat ini dan menjadi salah satu kearifan lokal (*local wisdom*). Pelanggaran dan atau pengingkaran adat dan budaya sering dimarkahi dengan ungkapan ajawera yang berkonotasi

pelecehan. Pelaku umunya mendapat sanksi adat berupa ngaturang bendu piduka 'upacara adat permohonan maaf'; bahkan bisa pula mendapat sanksi sosial berupa kasepe kang 'dikeluarkan' dari anggota desa *pakraman*, sesuai *awig-awig desa pakraman* masing-masing.

Desa *pakraman* merupakan lembaga sosial yang otonom sehingga dapat menetapkan *awig-awig* 'aturan' secara mandiri. Namun demikian, ditemukan kesamaan pola atau struktur dasar *awig-awig desa pakraman* di Bali. Kesamaan pola *awig-awig* dapat dideskripsikan seperti berikut ini.

1. Semua *awig-awig* disusun menggunakan ragam bahasa Bali *alus singgih* (ragam sangat hormat).
2. *Awig-awig* umumnya ditulis dengan huruf Bali Latin, tetapi ada yang ditulis dengan dwiaksara, yakni aksara Bali dan Bali Latin.
3. Semua *awig-awig* disusun dengan pola yang relatif sama, yakni *aran lan wewidangan, pamikukuh lan patitis, sukarta tata pakraman, sukarta tata agama, suksrta pawongan, dan wicara lan pamidanda*. Struktur ini sejalan dengan falsafah *tri hita karana* yang menjadi pokok penyusunan *awig-awig*.
4. Struktur isi *awig-awig* relatif sama, yakni *sarga* 'bab' *palet*, dan *pawos*. Pembagian ini bersifat hirarkis.
5. Jumlah *sarga*, *palet*, dan *pawos* berbeda antardesa *pakraman* sesuai kebutuhan dan kesepakatan krama.

3.2 Pembinaan Bahasa Bali

Pembinaan bahasa merupakan usaha untuk mengukuhkan pemakaian bahasa di kalangan orang yang telah menguasainya dengan memperdalam pengetahuan dan wawasan tentang bahasa itu, dan meningkatkan sikap positif terhadapnya (Kridalaksana, 1993). Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud pembinaan bahasa Bali adalah program yang disusun pemerintah Provinsi Bali bersama lembaga terkait, seperti Badan Bahasa, Aksara, Sastra Bali, dan perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasa Bali dan menumbuhkan penghargaan sehingga menjadi bangga terhadap bahasa Bali,

termasuk aksara dan sastranya. Pembinaan bahasa Bali tidak hanya bertujuan agar bahasa ini tetap dipakai dan dihargai sebagai identitas etnis Bali, tetapi lebih jauh daripada itu untuk peletarian dan pengembangan budaya lokal.

Bahasa Bali merupakan bahasa daerah yang memiliki tradisi kesastraan yang kuat. Banyak karya sastra Bali klasik ditulis dalam lontar dengan menggunakan aksara Bali. Lontar-lontar itu kini tersebar dan tersimpan di berbagai tempat, seperti Gedong Kirtya, Singaraja; Pusat Dokumentasi Budaya, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Perpustakaan Lontar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, pada Puri-Puri Kerajaan di Bali, bahkan disimpan oleh perorangan. Untuk memahami nilai sastra yang terdapat dalam naskah lontar tersebut, penguasaan bahasa dan aksara Bali menjadi keharusan. Oleh karena itu, pembinaan bahasa Bali memiliki nilai humaniora yang sangat strategis. Pembinaan bahasa merupakan bagian integral dari perencanaan bahasa yang merupakan tindakan politis dan administratif untuk mempengaruhi perkembangan suatu bahasa.

Dalam politik bahasa Nasional ditegaskan bahasa Bali merupakan salah satu bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Bali merupakan bagian dari kebudayaan nasional. Oleh karena itu, bahasa Bali wajib dibina dan dikembangkan. Mengacu kepada keputusan politik dan administratif itu, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992 yang mengatur pembinaan dan pengembangan bahasa Bali. Pembinaan bahasa Bali dilaksanakan dengan prinsip usaha bersama, kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Pembinaan dan pengembangan bahasa Bali itu bertujuan untuk: (a) menjamin kesinambungan pemakaian bahasa, aksara, dan sastra Bali; (b) mengembangkan kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional; (c) memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa, aksara, dan sastra Bali; (d) melestarikan bahasa, aksara, dan sastra Bali.

Pembinaan itu diharapkan dapat memperkokoh fungsi utama bahasa Bali sebagai: (a) lambang kebanggaan dan identitas daerah serta masyarakat penutur dan pendukung Bahasa Bali; (b) alat komunikasi dan ekspresi keluarga; (c) sebagai media dari

kebudayaan daerah Bali dan agama Hindu; (d) Sebagai bahasa dan aksara yang dipergunakan dalam *awig-awig* desa adat, banjar adat dan lembaga adat lainnya; (e) sebagai bahasa yang dapat memperkaya perbendaharaan Bahasa Indonesia, yang saling menunjang dan menghidupi satu dengan yang lainnya; (f) mengungkapkan budaya dan unsur kreativitas masyarakat penutur serta pendukungnya.

Persoalan yang dihadapi bahasa Bali, juga oleh mayoritas bahasa daerah di Indonesia, adalah jumlah penutur yang semakin berkurang. Salah satu faktor pemicunya adalah mobilitas penduduk yang sangat dinamis. Faktor lain yang tampak cukup dominan adalah bersumber dari bahasa Bali secara internal. Faktor linguistik ini terlihat sangat jelas ketika bahasa Bali sering gagal mewadahi konsep 'kekinian' yang menjadi ciri kehidupan masyarakat Bali. Berdasarkan fakta empirik ini dikeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 20 Tahun 2013 yang mewajibkan bahasa Bali diajarkan sebagai muatan lokal pada semua jenjang dan jenis sekolah di seluruh Provinsi Bali, sekurang-kurangnya dua jam pelajaran setiap minggu. Konsekuensi logis dari penetapan bahasa Bali sebagai pelajaran muatan lokal wajib dalam peraturan gubernur itu pun diatur kewajiban Gubernur Bali dan seluruh bupati / wali kota untuk mengangkat guru bahasa Bali sesuai kemampuan.

Komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk membina dan mengembangkan bahasa Bali tidak berhenti sampai di sana. Sejak tahun 2016, Pemerintah Provinsi Bali mengadakan penyuluh bahasa Bali yang ditempatkan pada setiap desa pakraman. Tugas pokok para penyuluh bahasa Bali adalah melaksanakan pembinaan terhadap pemakai dan pemakaian bahasa Bali, pembinaan terhadap penulisan aksara Bali, pembinaan kesusastraan Bali, seperti pesantian, pembinaan bahasa Bali dalam *awig-awig desa pakraman*. Jadi, pembinaan bahasa Bali yang dilaksanakan pemerintah, perguruan tinggi, dan pihak lain yang terkait pun berakitan dengan penggunaannya dalam *awig-awig desa pakraman*. *Awig-Awig* merupakan kerangka ikatan untuk menjadikan desa *pakraman* sebagai lembaga sosial.

3.3 Tindak Tutur dalam Awig-Awig Desa Pakraman

Tindak tutur sering disebut dengan istilah yang berbeda-beda. Ada yang menyebut dengan istilah tindak ujar; dan ada pula yang menyebut tindak berbahasa. Meskipun demikian, ketiga istilah itu memiliki pengertian yang sama. Ketiga istilah itu memiliki padanan yang sama dalam bahasa Inggris, yakni *speech acts*. Oleh karena ketiga istilah itu memiliki makna dan bersumber dari konsep yang sama, maka ketiga istilah itu dinyatakan bentuk bersaing dalam bahasa Indonesia yang tetap dapat digunakan secara bergantian.

Awig-awig desa pakraman bukan semata-mata dokumen tertulis, tetapi merupakan ikatan sosial dalam bingkai falsafah *tri hita karana*. Sebagai sebuah ikatan sosial, *awig-awig* dapat dipandang sebagai komunikasi tektual antara lembaga adat yang direpresentasikan dengan para prajuru 'pengurus' sesuai dengan struktur organisasi dan tatapamong desa pakraman bersangkutan dengan krama 'warga' pada umumnya. Hubungan kelembangaan dengan krama identik dengan relasi komunikator dengan komunikan dalam satu peristiwa tutur. Oleh karena itu, teks *awig-awig desa pakraman* merupakan satu peristiwa komunikasi budaya yang melibatkan penutur dan petutur dalam konteks adat dan budaya agama Hindu.

Austin (1975) mengatakan bahwa suatu ekspresi tutur (ujaran) dapat digunakan untuk melakukan sesuatu, selain untuk mengatakan sesuatu. Mengacu batasan konseptual itu, Nababan (1987) mengatakan bahwa dalam bertutur seseorang tidak hanya mengatakan sesuatu tetapi juga melakukan sesuatu; misalnya seseorang mengatakan "Saya akan bayar bulan depan" maka penutur tersebut sesungguhnya melakukan tindakan berjanji. Mecermati batasan konseptual yang dikemukakan Austin dan Nababan di atas, secara operasional tindak bahasa dapat dieksplanasi seperti berikut. Bahwa tindakan manusia dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yakni tindakan fisik, seperti mencangkul, berjalan, melempar; dan tindak berbahasa, seperti menegaskan, memastikan, memerintah. Tindakan fisik dapat terlaksana dengan baik meskipun pelakunya

tidak mengatakan sesuatu. Tidak demikian halnya dengan tindak berbahasa. Tindakan ini hanya akan terlasana dengan baik apabila partisipan mengatakan sesuatu. Seseorang tidak dapat melakukan tindakan berjanji, misalnya, tanpa mengatakan janjinya kepada petutur; seseorang tidak dapat melakukan tindakan menegaskan atau memerintah jika tidak mengatakan informasi dan perintah yang dimaksud. Jadi, tindak berbahasa hanya akan terlasana dengan baik jika penutur mengatakan sesuatu yang memiliki nilai validitas.

Kajian tindak tutur penggunaan bahasa Bali dalam *awig-awig desa pakraman* berpijak pada kajian pragmatik dengan berfokus pada tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Austin (1975), Nababan (1987), dan Wijana (1996) mengatakan bahwa tindak lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu; yang mengaitkan satu topik dengan satu keterangan dalam satu proposisi atau pernyataan. Konsep ini dieksplisitkan kembali oleh Thomas (1995) yang menyatakan bahwa hakikat tindak lokusi adalah realisasi ujaran berdasarkan pilihan kata dan konstruksi kalimat yang digunakan. Dengan mengacu padangan para pakar tersebut, tindak lokusi disetarakan dengan jenis tindak tutur yang digunakan. Jenis tindak tutur diklasifikasi berdasarkan relevansi modus kalimat dengan fungsinya dalam satu peristiwa komunikasi dan keeksplisitan maksud dengan pilihan kata yang digunakan (Grundy, 2000). Berdasarkan konsep dan dasar klasifikasi tersebut teridentifikasi kemungkinan lokusi tindak tutur yang digunakan dalam *awig-awig desa pakraman* adalah langsung-literal, langsung-takliteral, taklangsung-literal, dan taklangsung-takliteral. Lokusi langsung- literal dicirikan oleh kesesuaian modus ujaran dengan fungsinya, serta terdapat pilihan kata yang bermakna eksplisit. Lokusi langsung-takliteral dicirikan oleh kesesuaian modus ujaran dengan fungsinya, namun pilihan kata yang digunakan tidak bermakna eksplisit. Lokusi taklangsung-literal dicirikan oleh adanya perbedaan modus ujaran dengan fungsinya, namun pilihan kata yang digunakan bermakna eksplisit. Lokusi taklangsung-takliteral dicirikan oleh adanya perbedaan modus ujaran dengan fungsinya serta pilihan

kata yang digunakan tidak bermakna eksplisit. Prosedur analisis tindak tutur ini digunakan secara konsisten untuk mengkaji penggunaan bahasa Bali dalam *awig-awig desa pakraman*.

Awig-awig desa pakraman bukanlah teks berbahasa Bali tanpa konteks. *Awig-awig* disusun dan disetujui bersama dalam konteks pemeliharaan kelembagaan sosial adat. Sebagai upaya pemeliharaan kelembagaan sosial adat, dalam *awig-awig* termuat enam topik utama, yang setiap topik dituangkan dalam sarga 'bab' tersendiri. Keenam topik itu adalah: *aran lan wawidangan* desa 'nama dan batas desa', *patitis lan pamikukuh* 'tujuan dan landasan yuridis', *sukerta tata pakraman* 'aturan organisasi adat', *sukerta tata agama* 'aturan pelaksanaan kegiatan agama', *sukerta tata pawongan* 'tata kehidupan sosial', *wicara lan pamidanda* 'pelanggaran dan sanksi'. Setiap topik diungkapkan dengan tindak tutur yang berbeda (Arnawa, dkk, 2018c).

3.1.1 Tindak Tutur pada Sarga Aran lan Wawidangan serta Sarga Patitis lan Pamikukuh

Sarga aran lan wawidangan desa 'bab nama dan batas desa' serta *sarga patitis lan pamikukuh* 'bab tujuan dan landasan yuridis' umumnya diungkapkan dengan lokusi tindak tutur langsung-literal. Dikatakan demikian karena sarga ini dikonstruksi dengan modus ujaran yang bersesuaian dengan fungsinya serta pilihan kata yang digunakan bermakna eksplisit. Penggunaan lokusi langsung-literal bertujuan untuk menghindari ketaksahan makna *awig-awig* sehingga terhindari dari perdebatan publik atas isi dan pelaksanaannya. Ketaksahan makna sangat dihindari dalam penyusunan *awig-awig* agar memiliki nilai kepastian yang tinggi. Untuk mendukung analisis ini disajikan kutipan data dari *awig-awig* desa adat Alap Sari, Jinengdalem, Buleleng berikut ini.

Pawos 1
'pasal 1'

- (1) *Desa adat puniki mawasta desa adat Alap Sari ring desa Jinengdalem.*
'Desa adat ini bernama desa adat Alap Sari berada di Desa Jinengdalem'

- (2) *Jebag kakuwub wawidangannya mawates nyatur luwire:*
'Luas wilayahnya berbatasan dengan:'
- a. Sisih lor : Banjar Telaga Sari
Sebelah utara : Banjar Telaga Sari'
 - b. Sisih wetan : Desa Sinabun
Sebelah timur : Desa Sinabun
 - c. Sisih kidul : Desa Alasanger lan Poh Bergong
Sebelah selatan : Desa Alasangker dan Poh Bergong
 - d. Sisih kauh : Desa Penglatan
Sebelah barat : Desa Penglatan
- (3) *Desa puniki kawangun antuk karang ayahan desa, tur kakepah dados 2 (kalih) banjar, luwire:*
'Desa ini terdiri dari tanah desa, dan dibagi menjadi dua banjar, yakni:'
- a. *Banjar Bukit, kakepah dados kalih tempek, luwire: Tempek Kelod Kangin, Tempek Kaja Kangin*
'Banjar Bukit, terdiri dari 2 (dua) tempek, yakni: Tempek Kelod Kangin, dan tempek Kaja Kangin'
 - b. *Banjar Gambang, kakepah dados 2 (kalih) tempek, luwire: Tempek Kelod Kauh, Tempek Kaja Kauh.*
'Banjar Gambang, terdiri dari 2 (dua) tempek, yakni: Tempek Kelod Kauh dan Tempek Kaja Kauh'

Pawos 2

'Pasal 2'

Desa ngamanggehang pamikukuh makadi:

'Landasan hukum desa ini adalah:'

- (1) Pancasila
- (2) Undang-Undang Dasar 1945
- (3) Perda Nomor 06 Tahun 1986
- (4) Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir terhadap aspek agama Hindu I sampai dengan XV
- (5) Tri Hita Karana

Indik patitis desa adat ngarajegang, luwire: 'Tujuan desa adat ini menegakkan:'

- (1) *Mikukuhang miwah ngarajegang Sang Hyang Agama*
'Memperkokoh dan melestarikan ajaran agama'
- (2) *Nginggilang prawertine maagama*
'Meningkatkan kewajiban beragama'
- (3) *Ngrajegang kasukertan desa saha pawongan skala lan niskala*
'Menegakkan ketertiban desa dan kemasyarakatan'

Kutipan data di atas menunjukkan penggunaan lokusi langsung-literal secara konsisten. Kalimat yang digunakan seluruhnya bermodus berita yang digunakan untuk menyampaikan deskripsi dan informasi tentang desa, serta pilihan kata yang digunakan seluruhnya bersesuaian dengan maksud tuturan awig-awig itu. Konstruksi ujaran tersebut menggambarkan penggunaan tindak tutur konstantif secara konsisten (Arnawa, dkk., 2018a).

Ilokusi *Sarga aran lan wawidangan desa* 'bab nama dan batas desa' serta *sarga patitis lan pamikukuh* 'bab tujuan dan landasan yuridis' umumnya diungkapkan dengan tindak tutur asertif, yakni ujaran yang dimaksudkan untuk membangun kepercayaan atau pengetahuan yang sama pada setiap krama desa pakraman. Proposisi digunakan untuk menyampaikan suatu topik sehingga dipercaya sebagai suatu kebenaran kolektif. Kebenaran kolektif diharapkan dapat menumbuhkan hegemoni sosial pada krama desa.

Verba tindak ujar (ilokusi) asertif yang dominan dalam sarga dan paos ini adalah menegaskan dan menunjukkan, seperti data yang dikutip dari awig-awig desa pakraman Batusari, Gianyar, berikut ini.

Paos 1

'Pasal 1'

- (1) *Desa adat puniki mawasta desa adat Batusari.*
'Desa adat ini bernama desa adat Batusari'
- (2) *Jimbar kakuwub wawidangan mawates nyatur:*
'Luasnya dibatasi pada empat arah:'
 - a. Sisi kangin : telabah
Sebelah timur : parit
 - b. Sisi kelod : tukad Danti lan Pakerisan
Sebelah selatan : sungai Danti dan Pakerisan
 - c. Sisi kauh : tukad Pakarisan
Sebelah barat : sungai Pakerisan
 - d. Sisi kaja : carik Tegalbanua
Sebelah utara : perswahan Tegalbanua.
- (3) *Desa adat Batusari wantah tunggal banjar inggih punika banjar Batusari.*

'Desa adat Batarsari hanya terdiri dari satu dusun yakni dusun Batarsari'

Tindak tutur asertif pada pasal 1, ayat 1 dan 3 dikonstruksi dengan ilokusi menegaskan. Artinya, maksud yang tersurat pada tuturan itu adalah menegaskan kepada pembaca *awig-awig* itu, terutama kepada seluruh krama desa adat yang bersangkutan. Tidak ada lagi keraguan sedikitpun tentang isi informasi itu; meskipun tidak menggunakan verba tindak ujar menegaskan itu secara eksplisit. Ilokusi yang berbeda ditunjukkan pada pasal 1 ayat 2. Pada ayat ini, ilokusi yang ditarget adalah menunjukkan, yang dimplementasikan dengan mendeskripsikan batas-batas desa pada empat arah mata angin. Penunjukan batas desa *pakraman* itu diharapkan memberikan kepastian luas wilayah desa yang wajib dijaga dan dipelihara oleh seluruh krama desa *pakraman* Batarsari, Gianyar.

Sarga patitis lan pamikukuh 'bab tujuan dan landasan yuridis' dimaksudkan untuk menetapkan dan menginformasikan tujuan dan landasan yuridis penyusunan *awig-awig*. Penetapan dan penginformasian itu bermuara pada terbangunnya kesamaan pemahaman dan pengetahuan tujuan lembaga sosial desa *pakraman* tersebut. Ilokusi tindak tutur asertif yang digunakan pada sarga ini adalah memastikan. Nilai kepastian lebih tinggi daripada penegasan. Artinya, setiap desa *pakraman* memiliki tujuan dan landasan yuridis yang pasti dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, seperti data yang dikutip dari *awig-awig desa pakraman* Menaga, Karangasem berikut ini:

Paos 2

'Pasal 2'

*Maka pikukuh desa pakraman Menaga,
ngrajengang, mikukuhin, kalih matindihin:*

'Landasan yuridis desa pakraman Menanga, melestarikan,
memperkokoh, dan setia:

ha. Pancasila

na. Undang-Undang Dasar 1945; lan ca. Tri Hhita Karana

Paos 3
'Pasal 3'

Patitis, tatojun desa pakraman Menaga, luwire: 'Tujuan desa pakraman Menaga, yaitu:
ha. Mikukuhin miwah ngrajegang dharma agama lan dharma negara.
'Menaati dan menjunjung tinggi kewajiban agama dan bernegara'
na. Ngingilang tata prawertine magama Hindu; lan
'Meningkatkan tatakrama bergama Hindu; dan'
ca. Ngrajegang kasukerta desa saha pawongannya.
'Melestarikan keharmonisan desa dan warganya'

Ilokusi tindak tutur asertif pada paos 2 dan 3 dari awig-awig desa pakraman Menaga, Karangasem tersebut di atas adalah memastikan. Tindak ujar ini bertujuan untuk meyakinkan guru wisea 'pemerintah' bahwa kehadiran desa pakraman Menaga tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan verba tindak ujar memastikan diharapkan pemerintah tidak meragukan eksistensi desa pakraman Menaga, Karangasem tersebut.

Perlokusi yang ingin dicapai dari penggunaan tindak tutur asertif dengan ilokusi memastikan, menunjukkan, dan menegaskan pada *sarga aran lan wewidangan* serta *patitis lan pamikukuh* adalah ketidakraguan dan keyakinan seluruh warga atas wilayah dan tujuan desanya. Nilai kepastian ini patut diduga yang menyebabkan kemunculan hegemoni sosial secara internal, yang tumbuh atas kesadaran sendiri.

3.1.2 Tindak Tutur pada Sarga Sukerta Tata Pakraman

Secara umum, *sarga sukerta tata pakraman* terdiri dari enam sub, yaitu: *indik krama 'tentang kewargaan'*, *indik prajuru 'tentang kepengurusan'*, *indik paruman lan sangkepan 'tentang permusyawaratan'*, *indik kulkul 'tentang kentongan'*, *indik druwen desa 'tentang aset desa'*, dan *sukerta pamitegep 'aturan tambahan'*. Pada aspek kewargaan tercakup topik: batasan warga desa *pakraman*, tatacara menjadi krama desa

pakraman, kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap *krama* desa, hak *krama*, pemberhentian sebagai *krama* desa. Pada sub kepengurusan tercakup topik: tatacara pemilihan pengurus, hierarki kepengurusan, kewajiban, dan hak pengurus. Pada sub permusyawaratan diatur topik: rapat pengurus, rapat warga, prosedur rapat, keputusan, pelaksanaan putusan. Pada sub kentongan diatur: varian bunyi kentongan untuk kegiatan piodalan, gotong royong, kematian, pernikahan, dan kebencanaan, yang meliputi *artabaya* 'kemalingan', kabayapati 'pembunuhan', kagenibaya 'kebakaran', katoyabaya 'kebanjiran'. Pada sub aset desa diatur: daftar aset desa seperti: pura, tanah, kuburan, fasilitas umur, seperti: lapangan desa, pasar desa, balai desa, balai banjar, dan lain- lain; kewajiban pengurus dalam pengelolaan aset. Pada sub aturan tambahan umumnya diatur pengelolaan aset milik pribadi warga masing-masing, seperti: peternakan warga, pengelolaan lahan pertanian, pembangunan rumah dan sejenisnya, dan lain-lain.

Tindak lokusi yang digunakan dalam sarga sukerta tata pakraman ini adalah tindak tutur langsung-literal dan tindak tutur taklangsung-literal. Penggunaan tindak tutur langsung literal untuk menghindari ketaksaan makna akibat interpretasi yang berbeda. Ujaran dikonstruksi dengan pola tema - rema dan rema - tema. Tema merupakan informasi lama; sedangkan rema merupakan informasi baru. Slot tema diisi oleh frasa nomina yang secara tematik diacukan kepada warga, pengurus, atau sesuatu sesuai topik; sedangkan slot rema diisi oleh frasa lain untuk menyatakan informasi baru yang menjadi fokus pasal dan ayat tertentu. Untuk memperjelas tindak lokusi sarga ini disajikan data berikut (dikutip dari awig-awig Desa adat Rendang, Karangasem).

Pawos 7

'Pasal 7'

- (1) *Sane kabawos krama desa inggih punika sang maagama Hindu sane sampun buluangkep.*
'Yang disebut warga desa adalah orang yang beragama Hindu serta sudah menikah'

- (2) *Krama desa manut pepaliha wenten kalih soroh: 'Warga desa dipilah menjadi dua kelompok:'*
- a. *Kulawarga sane buluangkep saha magama Hindu, tur sampun ngranjing makrama desa sinaggeh krama desa adat Rendang.*
'Keluarga yang sudah menikah serta beragama Hindu, dan sudah masuk warga desa disebut krama desa adat rendang'
 - b. *Kulawarga sane mawit saking dura desa, risampun jumenek magenah lintang ring tigang sasih, sinanggeh krama tamiu.*
'Keluarga yang berasal dari desa lain, setelah tinggal menetap lebih dari tiga bulan, disebut warga pendatang'

Pasal 7 ayat 1 dan 2 disusun dengan menggunakan pola tema – rema. Tema pada kedua ayat itu adalah krama desa 'warga desa' sedangkan remanya berbeda. Rema pada ayat 1 adalah *sang maagama Hindu sane sampun buluangkep* 'orang yang beragama Hindu dan sudah menikah'. Rema pada ayat 2 adalah *wenten kalih soroh* 'ada dua jenis'. Rincian pasal 7 ayat 2 huruf a dan b disusun dengan struktur informasi rema – tema. Rema pada huruf a yakni *kulawarga sane buluangkep saha magama Hindu, tur sampun ngranjing makrama desa* 'keluarga yang sudah menikah serta beragama Hindu, dan sudah masuk warga desa' sedangkan temanya adalah krama desa adat Rendang. Rema pada huruf b adalah *kulawarga sane mawit saking dura desa, risampun jumenek magenah lintang ring tigang sasih* 'keluarga yang berasal dari desa lain, setelah tinggal menetap lebih dari tiga bulan' dan temanya adalah krama tamiu 'warga pendatang'. Ikatan rema – tema pada huruf a dan b di atas menggunakan piranti leksikal sinanggeh 'disebut'.

Berdasarkan relasi modus dan fungsi ujaran yang digunakan, tampak jelas bahwa pawos 7 awig-awig desa adat Rendang di atas menggunakan tindak tutur langsung karena modus ujaran yang digunakan adalah berita untuk menyampaikan informasi kepada pembaca. Selanjutnya, berdasarkan diksi dan maksud ujaran pun bersesuaian sehingga disebut tindak tutur literal. Jadi

tindak lokusi yang digunakan pada sarga ini adalah tindak tutur langsung – literal.

Selain langsung-literal, pada sarga Sarga Sukerta Tata Pakraman ditemukan pula penggunaan tindak lokusi taklangsung- literal; yakni modus berita tetapi digunakan untuk menyatakan perintah dengan diksi yang bersesuaian dengan maksudnya. Untuk mendukung analisis ini, disajikan kutipan data dari awig-awig desa adat Penarukan, Buleleng berikut ini.

Pawos 20

'Pasal 20'

- (7) *Sajeroning paruman desa, kelihan desa patut sonyahang pamargin ngenterang desa ngeniin indik:*
'Selain rapat desa, ketua desa adat wajib mengumumkan jalannya pengelolaan desa terutama mengenai:'
- a. *Munjuk lungsuring pakraman makadi ayah-ayahan;*
'Kewajiban warga desa pakraman'
 - b. *Pamargi panelas miwah sulur arta brana druwen dasa lan sane siosan;*
'Pertanggungjawaban dan neraca harta kekayaan desa serta yang lainnya'
 - c. *Sahanan wicara saha pamutus-pamutusnya;* 'Setiap masalah dan keputusannya'
 - d. *Rencana ngeniin usaha desa awarsa sane pacang rauh;*
'Rencana kegiatan desa setahun berikutnya'
 - e. *Rencana pikolihnya lan prebea desa awarsa sane pacang rauh;*
'Rencana pendapatan dan biaya desa setahun berikutnya'
 - g. *Daging perarem miwah paswara-paswara sane mabuat.*
'Inti keputusan rapat dan saran-saran yang penting'

Tindak lokusi pawos 20 di atas menggunakan modus berita tetapi digunakan untuk menyatakan maksud perintah, yakni agar ketua desa adat melaksanakan hal-hal seperti yang dirinci dari huruf a – g. Pilihan kata yang digunakan masih bersesuaian dengan maksud tindak lokusinya. Penggunaan lokusi taklangsung-literal dimaksudkan untuk menghasilkan kesantunan berbahasa dan terhindar dari ketaksaan. Untuk menyatakan fungsi direktif,

penggunaan lokusi taklangsung dalam budaya berbahasa Bali dinilai lebih santun daripada lokusi langsung.

Tindak ilokusi dominan pada Sarga Sukerta Tata Pakraman adalah asertif dan direktif. Penggunaan tindak tutur asertif bertujuan untuk membangun pemahaman yang sama tentang satu informasi terkait dengan tata tertib desa *pakraman*. Setiap krama desa *pakraman* wajib memiliki pengetahuan yang sama tentang isi *awig-awig*. Pemilikan pengetahuan yang sama berpengaruh kepada sikap positif atau ketaatan terhadap *awig-awig*. Ketaatan internal ini memunculkan hegemoni sosial dalam satu wadah desa *pakraman*, seperti data berikut, yang dikutip dari *awig-awig* Desa Pakraman Batur Sari, Gianyar.

Pawos 4

'pasal 4'

- (1) *Sane kabawos krama desa inggih punika kulawarga sane sampun nglaksanayang pawiwahan, magama Hindu wed Dasa Adat Batur sari, jenek tan jenek ring karang desa.*
'Yang disebut warga dasa adalah keluarga yang telah menikah, beragama Hindu berasal dari Desa Adat Batur Sari, menempati tanah desa ataupun tidak'
- (2) *Sajaba punika sinanggeh tamiu.*
'Selain itu disebut pendatang'

Pawos 4 di atas menegaskan informasi tentang batasan dan klasifikasi warga desa pakraman Batur Sari. Penegasan itu dimaksudkan untuk membangun pemahaman yang sama tentang hakikat warga desa. Menegaskan merupakan verba tindak ujar asertif yang bertujuan membentuk kepercayaan yang sama antara penutur dengan petutur. Dalam konteks *awig-awig*, penutur adalah lembaga desa *pakraman* sedangkan petuturnya adalah warga desa yang bersangkutan. Untuk memperkuat analisis ini, disajikan data yang dikutip dari *awig-awig* Desa Pakraman Sumerta, Denpasar.

Pawos 13

'pasal 13'

- (1) *Sahanan sang jenek mapaumahan ring desa adat Sumerta*

sinanggeh wong desa adat Sumerta.

‘Setiap orang yang tinggal menetap di desa adat Sumerta disebut warga desa adat Sumerta’

(2) *Wong desa inucap linggihnyane wenten kalih soroh:*

‘Warga desa tersebut dibedakan menjadi dua jenis:

a. *Kulawarga magama Hindu tur ngranjing makrama sinanggeh warga desa*

‘Keluarga beragama Hindu dan terdaftar sebagai warga disebut warga desa’

b. *Kulawarga sane magama seosan ring agama Hindu, kasukserahang ring pararem banjar soang-soang linggihnyane.*

‘Keluarga yang beragama selain Hindu, diputuskan pada permufakatan masing-masing banjar tempat mereka tinggal’

Selain asertif, pada Sarga Sukerta Tata Pakraman pun ditemukan ilokusi tindak tutur direktif. Seperti yang dikatakan para pakar (Wijana, 1996; Nababan, 1987; Austin, 1975) bahwa tindak tutur direktif merupakan ujaran yang dimaksudkan untuk mengatur petutur. Bagi petutur, tindak tutur direktif sebagai alasan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam konteks *awig-awig* ini, tuturan dalam pasal-pasal tertentu memerintahkan *krama desa pakraman* untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, seperti data berikut yang dikutip dari *awig-awig* Desa Adat Sumerta, Denpasar.

Pawos 14

Pasal 14

(1) *Sahanan warga desa sane sampun marabian patut ngawit tedun makrama.*

‘Setiap warga desa yang sudah menikah wajib memulai ikut sebagai warga desa adat’

(2) *Satunggil krama manut kerendahan kulawarganya patut keni ayah.*

‘Setiap satu keluarga mutlak ada yang kena ayah ‘kewajiban’.

Pawos 14 ayat (1) dan (2) di atas disusun dengan modus kalimat berita, tetapi difungsikan untuk memerintah, sedangkan pilihan kata yang digunakan masih bersesuaian dengan maksud ujaran itu. Atas fakta itu, lokusi tindak tutur yang digunakan adalah taklangsung-literal. Ilokusi tindak tutur *pawos* 14 di atas adalah direktif agar warga yang sesuai ayat itu wajib melaksanakannya. Untuk mendukung analisis tersebut disajikan kutipan dari *awig-awig* desa adat Alap Sari, Buleleng, seperti berikut ini.

Pawos 6

Pasal 6

Panemayan tedun makrama desa:

‘Batas waktu melaksanakan kewajiban krama desa.’

- a. *Ngawit 3 (tigang) sasih sasampun mapawiwahan;* ‘Dimulai setelah 3 bulan menikah’
- b. *Ngawit 6 (enem) sasih risampun naur penanjung batu manut pararem.*
‘Dimulai setelah 6 bulan membayar penantung batu (sejenis uang pokok) sesuai permusyawaratan’

Juga tercermin dari *awig-awig* Desa Adat Rendang, Karangasem berikut ini.

Pawos 19

‘Pasal 19’

- (1) *Desa adat patut madruwe kulkul.*
‘Desa adat wajib memiliki kentongan’
- (2) *Suaran tatepakan kulkul patut matiosan manut wiguna, luwire:*
‘Bunyi kentongan harus berbeda sesuai fungsinya, seperti:’
 - a. *Tetengeran wali, patut nguntit manut puja astawa.*
‘Pertanda upacara, wajib nguntit mengikuti persembahyangan’
 - b. *Tetengeran tedun ngayah, maka panulus daging arah-arah.*
‘Pertanda mulai gotong-royong, sebagai pelaksanaan pengumuman’
 - c. *Tetengeran kesedaan utawi kepademan sangkaning*

rahayu.

'Pertanda kematian wajar'

- d. *Tetengeran pawiwahan patut nguntit kalih tuludan.*
'Pertanda pernikahan wajib nguntit dua putaran.
- e. *Tetengeran kapancabaya: 'Pertanda ada marabahaya:'*
1. *Arta baya lan kabayapati, majalaran kapet pati, kabaak, 3 tuludan bulus;*
'Kemalingan dan pembunuhan, pada peristiwa perampokan, bertalu-talu tiga putaran'
 2. *Kagenibaya, kalih tuludan bulus; 'Kebakaran, bertalu-talu dua putaran'*
 3. *Katoyabaya, kayubaya, atuludan bulus.*
'Kebanjiran, pohon tumbang, bertalu-talu satu putaran'
- f. *Sanunggil wenten suaran kulkul kadi sianggeh ring patet 2e, wenang katimbal olih kulkul banjar-banjar.*
'Setiap ada bunyi kentongan seperti tersebut pada ayat 2e. Wajib diestafet oleh kentongan dusun-dusun'
- g. *Tetengeran kulkul ngwangdeang makarya atuludan lambat ngampel.*
'Pertanda bunyi kentongan, membatalkan pekerjaan warga saat itu'

Pawos 30

'pasal 30'

- (1) *Ngawit nandur tenem tuwuh patut ameter tengah ngejeroang saking watese.*
'Memulai menanam pohon wajib satu setengah meter ke dalam dari perbatasan'

Pawos 32

'Pasal 32'

- (1) *Sahaning krama desa sane mamiara wewalungan, patut sayaga nitenin negul, nagndangin mangda tan ngrusak karang utawi pakubon krama siyosan, bilih-bilih ngantos ngranjing ka pura.*
'Setiap warga desa yang memelihara ternak, wajib selalu mengikat atau mengandangkannya agar tidak merusak pekarangan atau rumah warga lain, apalagi sampai masuk ke pura'

Tindak perlokusi penggunaan tindak tutur asertif dan direktif pada *Sarga Sukerta Tata Pakraman* adalah mayoritas krama desa pakraman memami isi sarga ini yang dibuktikan dengan ketaatan dalam implementasinya. Pada umumnya krama desa pakraman melaksanakan kewajibannya sesuai lokusi dan ilokusi yang dimaksud dalam sarga ini. Ketaatan warga desa adat terhadap isi awig-awig, bukan karena takut pada dendanya, tetapi lebih didasarkan pada tanggung jawab personal dan sosial yang tumbuh dari internalnya. Secara personal, warga desa pakraman umumnya ingin mempertahankan prestise diri; dan secara sosial ingin tetap berterima di masyarakat.

3.1.3 Tindak Tutur pada *Sarga Sukerta Tata Agama*

Bab *Sukerta Tata Agama* ini umumnya memuat topik tentang parahyangan 'tempat suci' dan panca yadnya 'lima korban suci' yaitu dewa yadnya 'korban suci pada Tuhan', resi yadnya 'korban suci pada para pendeta', pitra yadnya 'korban suci kepada para leluhur', manusa yadnya 'korban suci pada manusia', dan buta yadnya 'korban suci pada para buta'.

Berdasarkan hasil pencatatan dokumen, pada sarga ini digunakan tindak lokusi langsung-literal dan taklangsung-literal. modus tindak lokusi langsung-literal yang digunakan adalah berita yang digunakan untuk menginformasikan sesuatu kepada warga, seperti data berikut yang dikutip dari Awig-Awig Desa Adat Batur Sari, Gianyar.

Pawos 34

'Pasal 34'

- (1) *Palinggih panyiwian sawidangan desa adat Batur Sari:*
"Tempat suci di lingkungan desa adat Batur Sari:"
 - a. Kahyangan tiga: Pura Desa/Bale Agung, Pura Puseh, miwah Pura Dalem.
 - b. Pura Prajapati
 - c. Pura Melanting
 - d. Pura Gumuk
- (2) *Rahina piodalan soang-soang kahyangan inucap, kadi ring sor:*

'Hari piodalan (upacara) masing-masing tempat suci tersebut, seperti berikut:'

a. *Pura Desa / Bale Agung lan pura Puseh ri kala Buda Umanis Medangsia.*

'Pura Desa / Bale Agung lan pura Puseh pada hari Rebo Umanis, wuku Medangsia'

b. Pura Dalem, Prajapati, Gumuk, Melanting ri kala tilem katiga.

'Pura Dalem, Prajapati, Gumuk, Melanting pada bulan mati ketiga menurut penanggalan Bali'.

- (3) *Pangaci ring pura inucap manut kecap sastra agama saha kalaksanayang nista, madia, utama manut pararem.*
'Upacara piodalan pada pura tersebut sesuai ajaran sastra agama, serta dilaksanakan tingkatan kecil, sedang, besar sesuai keputusan rapat'

Mencermati data kutipan di atas, tampak jelas bahwa modus ujaran yang digunakan adalah berita untuk menginformasikan dan menegaskan topik tempat suci dan upacara piodalannya. Berdasarkan fakta lingual tersebut dapat diketahui bahwa antara modus dengan fungsinya bersesuaian sehingga lokusnya dinyatakan langsung-literal. Untuk mendukung analisis ini, disajikan data lain yang dikutip dari *awig-awig* Desa Pakraman Baler Bale Agung, Jembrana, seperti berikut ini.

Pawos 1

Pasal 1

- (1) *Prahyangan sane wenten ring wewengkon banjar adat Baler Bale Agung inggih punika:*
'Tempat suci yang ada di lingkungan banjar adat Baler Bale Agung adalah:'
a. Pura Puseh
b. Pura Desa / Bale Agung
c. Pura Dalem
d. Sasuhunan Ida Dewa Ayu Sakti
- (2) *Pujawali ring kahyangan inggih punika:* 'Upacara piodalan di tempat suci itu adalah:'
a. *Pura Puseh ring Anggar Kasih Medangsia*
'Pura Puseh pada hari Selasa Umanis wuku Medangsia'
b. *Pura Desa (Bale Agung) ring rahina Saniscara umanis*

Kuningan

'Pura Desa (Bale Agung) pada hari Sabtu Umanis wuku Kuningan'

c. *Pura Dalem ring Anggar Kasih Julungwangi*

'Pura Dalem pada hari Salasa Umanis wuku Julungwangi'

Kaempon krama banjar adat Baler Bale Agung lan banjar adat Kebebeng.

'Diselenggarakan oleh warga banjar adat Baler Bale Agung dan banjar adat Kebebeng'

d. *Dewa Ayu Sakti ring rahina purnamaning kapat*

'Dewa Ayu Sakti pada saat bulan purnama keempat menurut penanggalan Bali'

Selain tindak lokusi langsung-literal, pada Sarga Sukerta Tata Agama ini pun ditemukan penggunaan tindak tutur taklangsung- literal, yakni ada ketidaksesuaian antara modus ujaran dengan fungsinya. Pada *sarga* ini ditemukan penggunaan modus berita untuk mengungkapkan maksud perintah, seperti data berikut ini yang dikutip dari awig-awig banjar adat Baler Bale Agung, Jembrana.

Pawos 6

'Pasal 6'

- (1) *Manusa yadnya inggih punika ...* 'Manusia yadnya adalah ,
- (2) *Krama banjar adat wenang keni ayahan tur kadadosang keni peson-peson marupa busung (janur) a muncuk, mangda kacacak olih juru arah soang-soang utawi jinah Rp 5000,00 (upacara nyambutin, mapades, pawiwahan).*
'Warga banjar adat wajib bergotong royong serta diperbolehkan dikenai urunan berupa sebatang janur, agar dicatat kehadirannya oleh pengurus masing-masing atau uang Rp 5000,00 (untuk upacara tiga bulan anak, potong gigi, dan pernikahan).
- (3) *Pelaksana yadnya kasanggra antuk pakraman manut kadi pinunas sang nagun yadnya.*
Upacara dilaksanakan oleh warga sesuai perminataan orang yang mempunyai upacara tersebut'
- (4) *Ritatkala krama ngayah makta don pisang 2 (kalih)*

papah. 'Pada saat warga gotong royong membawa 2 (dua) pelepah daun pisang.

- (5) *Yening wenten salah sinunggil warga mayadnya ring dura banjar/dura desa, kapatutan polih uron-uron busung a muncuk utawi jinah Rp 5000,00/KK, manut gebog arahan.* 'Jika ada salah satu warga menyelenggarakan upacara di luar banjar adat atau di luar desa, berhak mendapat urunan sebatang janur atau uang Rp 5000,00/KK, sesuai pengumuman'

Modus yang digunakan pada ayat 2 – 5 pasal 6 di atas adalah berita; namun fungsi yang diembannya adalah perintah. Oleh karena itu ayat 2 – 5 tersebut merupakan tindak tutur taklangsung. Mecermati pilihan kata yang digunakan, tampak jelas bersesuaian dengan maksud yang ingin disampaikan, sehingga dikatakan tindak tutur literal. berdasarkan dua indikator tersebut dapat dipastikan bahwa tindak lokusi ayat 2 – 5 adalah tindak tutur taklangsung – literal. Untuk mendukung analisis ini disajikan data lain yang dikutip dari *awig-awig* Desa Adat Sumerta, Denpasar.

Pawos 62

'Pasal 62'

1. *Upakara miwah brataning sasepen taler patut kemargiang.* 'Upacara dan larangan penyepian juga wajib dijalankan.
2. *Prajurune nuntun saha midabdabin mangda desane sidha trepti ring catur brata panyepian.* 'Para pengurus menuntun dan mengarahkan agar desa ini bisa tertib pada empat larangan penyepian'

Tindak ilokusi yang terdapat pada sarga Sukerta Tata Agama adalah asertif, direktif, dan komisif. Tindak tutur asertif direalisasikan dengan menyampaikan informasi dan penegasan tentang panca yadnya 'lima korban suci tulus ikhlas, tanpa pamrih'. Penginformasian dan penegasan itu dimaksudkan untuk membangun pengetahuan dan kepercayaan bersama di antara warga desa dan/atau banjar adat masing-masing. Untuk mendukung analisis ini disajikan data yang dikutip dari *awig-*

awig desa adat Alap Sari, Buleleng seperti berikut ini.

Pawos 30

'Pasal 30'

- (1) *Palingging panyiwian ring sawidangan desa inggih punika kahyangan desa.*
'Pura pokok di lingkungan desa disebut kahyangan desa'
- (2) *Rahina piodalan soang-soang kahyangan inucap kadi ring sor:*
'Hari upacara piodalan pura tersebut seperti di bawah ini.'
 - a. Pura Dalem rikala purnama kaenem.
'Pura dalem mana kala purnama bulan keenam'
 - b. Pura Bukit rikala pangelong apisan purnama kaenem.
'Pura Bukit satu hari setelah burnama bulan keenam'
- (3) *Pangaci ring pura inucap manut kecap sastra agama saha kalaksanayang antuk nista, madya, lan utama manut pararem.*
'Tingkatan upacara pada pura tersebut berdasarkan sastra agama dan dilaksanakan dengan tingkatan sederhana, madia, dan utama berdasarkan keputusan rapat'

Tuturan *pawos* 'pasal' 30 di atas merepresentasikan dua ilokusi yang berbeda. Tuturan pada ayat (1) dan (2) untuk menegaskan bahwa hanya terdapat dua pura yang berstatus sebagai kahyangan desa dengan hari piodalnya masing-masing. Ilokusi tersebut pun dapat dimaknai sebagai penegasan bahwa selain kedua pura tersebut bukanlah *pura panyiwian* 'pokok'. Tuturan pada ayat (3) menginformasikan pelaksanaan upacara piodalannya. Pada tuturan ayat (3) ini tidak ada penegasan. Tuturan pada ayat 3 menyatakan bahwa upacara dilaksanakan berdasarkan ajaran agama dan tingkatannya bisa nista 'sederhana', madia 'sedang', dan utama 'mulia'. Tingkatan upacara mana yang dilaksanakan berdasarkan pada keputusan rapat. Dengan demikian, tuturan ayat (3) bukanlah menegaskan tetapi menginformasikan.

Selain tindak asertif, pada *sarga Sukerta Tata Agama* pun ditemukan ilokusi direktif yang dikonstruksi dengan tindak tutur taklangsung - lial. Tindak ilokusi direktif merupakan ujaran yang dimasukkan untuk mengatur warga agar melakukan

sesuatu sesuai yang dinyatakan dalam *awig-awig*. Ujaran direktif menjadi alasan warga untuk bertindak dan atau tidak melakukan sesuatu. Untuk mendukung analisis ini, disajikan kutipan data yang bersumber dari awig-awig Desa Adat Alap Sari, Buleleng berikut ini.

Pawos 35

'Pasal 35' *Kasukertan kahyangan*

sekadi ring sor. 'Tatatertib tempat suci seperti berikut.

- 1) *Tan kalugra ngrajing ka pura, luwire*: 'Tak diizinkan masuk ke pura, yaitu:'
 - a. *Sang katiban catur cuntaka, luwire*:
'Orang yang ditimpa empat halangan, yakni;'
 - *Sebel kandel ngeraja sewala*
'Halangan menstruasi'
 - *Sebel maduwe putra*
'Halangan melahirkan'
 - *Sebel pengantenan*
'Halangan karena menikah'
 - *Sebel kapademan*
'Halangan kematian'
 - b. *Makta bebaktayan sinanggeh ngeletihin*
'Membawa sesuatu yang dinilai menodai kesucian pura'
 - c. *Sato agung, sajawining rikala mapapada (ngrebeg)*
'Binatang besar, kecuali saat upacara mapapada.'
 - d. *Mabusana tan manut kadi tata caraning ngranjing ka pura*
'Berpakaian tak pantas untuk memasuki pura'
 - e. *Saderang polih wak-wakan (pituduh) prajuru desa*.
'Sebelum mendapat perintah dari pengurus'
- 2) *Pratingkahe tan wenang ring pura*:
'Perbuatan yang dilarang di pura:'
 - a. *Masumpah (cor) sajawaning pituduh prajuru*.
'Bersumpah, kecuali petunjuk pengurus'
 - b. *Makebotan, maaras-arasan, makolem dados asiki lanang wadon, mabacin, mawicara, miwah nyangsang busana*.
'Menggunakan tangan kiri (mengidal), berciuman, tidur bersama laki-perempuan, berak, bertengkar, dan menjemur pakaian'
 - c. *Mungah tedun sajeroning palinggih*

sajawaning pituduh prajuru.

'Naik-turun pada tempat suci, kecuali perintah pengurus'

- d. *Tan kapatutan ngawentenang kelean.*
'Tidak dibenarkan berbuat tercela'

- 3) *Sang mamurug kecaping ring ajeng, keni pamidanda prayascita sepatutnya manut pararem.*
'Yang melanggar aturan tersebut, dikenai sanksi upacara penyucian secukupnya sesuai keputusan rapat'

Tuturan pawos 'pasal' 35 ayat (1) dan (2) di atas merupakan tindak ilokusi direktif. Pada ayat (1) dimuat larangan memasuki pura; dan pada ayat (2) memuat tingkah laku yang dilarang. Kedua larangan ini merupakan perintah sehingga menjadi alasan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam *awig-awig* itu.

Tuturan pada ayat (3) merupakan tindak ilokusi komisif untuk menyatakan kepastian pada waktu yang akan datang. Dalam konteks ayat (3) ini, kepastian yang dimaksud adalah sanksi bagi pelanggarnya. Artinya, siapa pun melanggar pasal 35 ini pasti akan dikenai sanksi prayascita 'upacara penyucian kembali' secukupnya, ysg tingkatannya diputuskan dalam rapat.

Tindak perlokusi yang tercermin dari warga desa adat adalah adanya pemahaman bersama terhadap isi *awig-awig* dan ketaatan untuk melaksanakan dan tunduk kepada *awig-awig* yang merupakan keputusan bersama. Warga desa adat umumnya taat atas isi awig-awig karena mereka sudah paham hakikat menjadi krama desa adat. Perlokusi ini merupakan wujud hegemoni sosial yang terjadi di desa pakraman pada umumnya.

3.1.4 Tindak Tutur pada Sarga Sukerta Tata Pawongan

Sarga Sukerta Tata Pawongan dimaksudkan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam lingkungan satu desa / banjar *pakraman*. *Sarga* ini memuat topik pernikahan, perceraian, *sentana*, dan warisan. Masing-masing desa *pakraman* menjabarkan topik-topik itu secara berbeda-beda, namun

memiliki hakikat yang sama.

Tindak lokusi yang digunakan pada *sarga* ini adalah langsung-literal dan taklangsung-literal. Tindak lokusi langsung-literal merupakan tindakan mengatakan sesuatu dengan modus dan fungsi ujaran yang bersesuaian, seperti data berikut yang dikutip dari *awig-awig* Desa Adat Alap Sari, Buleleng.

Pawos 48

'Pasal 48'

- (1) *Pawiwahan mapiteges patemoning purusa pradana kadasarin antuk pikayun pada ledang sane matetujon ngwangun keluarga bahagia kadulurin antuk upasaksi sekala lan niskala.*

'Pernikahan didefinisikan sebagai pertemuan laki perempuan didasari perasaan suka sama suka yang bertujuan membangun keluarga bahagia yang bersaksi secara nyata dan taknyata'

Modus ujaran *pawos 48* ayat (1) tersebut adalah berita dan digunakan untuk menegaskan informasi tentang hakikat pernikahan menurut Desa Adat Alap Sari. Ujaran itu diuraikan dengan menggunakan pilihan kata yang bersesuaian dengan maksud penggunaannya. Dengan demikian, lokusi ujaran *pawos 48* ayat 1 tersebut dikategorikan tindak tutur langsung-literal. Pada *pawos 48* ayat (1) ditegaskan bahwa topik-topik penting yang menjadi hakikat pernikahan adalah:

- a. Pertemuan *purusa - pradana*; secara harfiah *purusa* berpadanan dengan laki-laki dan *pradana* berpadanan dengan perempuan. Namun dalam konteks pernikahan 'nyentana', suami berstatus *pradana* sedangkan istri berstatus *purusa*. Dengan demikian, secara interpretatif, *purusa* dapat dimaknai penerus keturunan. Berdasarkan topik ini, maka pernikahan sejenis sangat dilarang;
- b. Berdasarkan suka-sama suka yang bermakna bahwa pernikahan atas kehendak sendiri bukan paksaan orang lain. Topik ini merupakan implementasi hak azasi manusia;

- c. Tujuan pernikahan adalah membangun keluarga bahagia;
- d. Bersaksi sekala artinya bersaksi di alam nyata, seperti dihadiri pejabat desa dinas dan desa adat; dan bersaksi niskala (taknyata) yang diwujudkan dengan upacara agama yang dipuput 'dipimpin' oleh sang sulinggih.

Topik (a - d) di atas merupakan informasi pokok yang disampaikan pada *pawos* 48 ayat (1) sehingga ujaran berlokusi tindak tutur langsung-literal. Demikian pula ujaran pada *pawos* berikut ini.

Pawos 50

'Pasal 50'

(1) *Wusan marabian wenten indik kakalih:*

'Perceraian ada dua jenis'

a. *Riantukan seda sinalih tunggil, punika mapiteges balu (balu lanang utawi balu istri)*

'Disebabkan salah satunya meninggal, ini disebut balu (cerai mati).

b. *Sane majalaran antuk pada lila utawi saking wicara, kasengguh nyapian.*

'Disebabkan adanya persoalan, disebut nyapian (berasal dari kata sapih yang artinya pisah).

Tuturan pada *pawos* 50 ayat (1) pun merupakan tindak tutur langsung-literal karena menggunakan modus berita untuk menyampaikan informasi tentang perceraian dan menggunakan pilihan kata yang bersesuaian dengan isi informasinya.

Tindak lokusi taklangsung - literal adalah penggunaan modus ujaran yang tidak bersesuaian dengan fungsi ujaran tersebut sedangkan pilihan diksi masih relevan dengan isi informasi yang ingin disampaikan, seperti tampak pada data berikut yang dikutip dari awig-awig desa adat Menanga, Karangasem berikut ini.

Pawos 46

'Pasal 46'

(4) *Sang sapa sira hugi krama desa istri palas marabian,*

mwali ke wirangnya, patut marisuda raga mangda tan kasinanggeh leteh, saha sampun masadok miuningang ring prajuru.

'Siapa saja warga desa perempuan bercerai, kembali ke keluarganya, wajib menyucikan diri agar tidak dianggap 'kotor' dan sudah melapor ke pengurus'

Tuturan pada *pawos* 46 ayat (4) di atas menggunakan modus berita tetapi digunakan untuk memerintah kaum perempuan yang bercerai dari suaminya agar melakukan upacara penyucian diri dan melapor ke pengurus desa adat. Perintah ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan yang bersangkutan meskipun dikonstruksi dengan modus berita. Meskipun modus tuturan itu tidak bersesuaian dengan fungsinya, namun pilihan diksi yang digunakan sangat bersesuaian dengan isi perintah yang wajib dilaksanakan. Dengan demikian, tuturan *pawos* 46 ayat (4) di atas berlokusi tindak tutur taklangsung - literal.

Tindak ilokusi yang terdapat pada Sarga Sukerta Tata Pawongan adalah asertif dan direktif. Ilokusi asertif digunakan untuk membangun pemahaman yang sama tentang suatu topik melalui penggunaan verba tindak ujar mendefinisikan dan menegaskan. Untuk mendukung analisis ini disajikan data yang dikutip dari *awig-awig* Desa Adat Batur Sari, Gianyar.

Pawos 58

'Pasal 58'

- (1) *Sentana wenten kalih soroh inggih punika: partisentana miwah sentana paperasan.*
'Ada dua jenis keturunan, yakni : anak kandung dan anak angkat'
- (2) *Pratisentanan inggih punika sentana sane metu saking pawiwahan sane patut utawi sah.*
'Anak kandung adalah keturunan yang lahir dari pernikahan yang benar dan sah'
- (3) *Prade wenten sentana....*
'Jika ada anak '
- (4) *Prade pawiwahan tan ngawetueang sentana, dados ngidih sentana antuk upasaksi sekala miwah niskala, mawasta sentana paperasan*

'Jika pernikahan tidak menghasilkan keturunan, dapat mengangkat anak disaksikan pemerintah dan prajuru desa adat dan diupacarai, disebut anak angkat'

Tindak ilokusi pawos 58 ayat (1) adalah mendefinisikan *pratisentana* dan ayat (4) menegaskan hak pengangkatan anak dan sekaligus mendefinisikan *sentana paperasan*. Dengan demikian tuturan ayat (4) berilokusi ganda, tetapi tidak taksa. Penggunaan verba tindak ujar mendefinisikan dan menegaskan merupakan ilokusi tindak tutur asertif yang bertujuan untuk memperoleh kepercayaan yang sama di antara warga Desa Adat Batur Sari, Gianyar.

Selain tindak ilokusi asertif, pada Sarga Sukerta Tata Pawongan juga ditemukan penggunaan tindak ilokusi direktif, yang digunakan untuk 'mengatur' krama desa/banjar adat, seperti data berikut yang dikutip dari *awig-awig* Desa Adat Batur Sari, Gianyar.

Pawos 60

'Pasal 60'

- (1) *Paperasan sane kapatutang ring desa risampun makacihna:*
'Pengangkatan anak dinyatakan benar atau sah oleh desa adat setelah dicirikan dengan:
 - a. *Widhi widana paperasan.*
'Dilaksanakan upacara pengangkatan'
 - b. *Kasaksiang olih prajuru desa sane makalinggang utawi ngilikitayang, tur kasibyahang ring krama desa.*
'Disaksikan oleh prajuru desa adat dan dicatatkan, serta disosialisasikan pada seluruh warga desa adat'
- (2) *Sang patut kaperas anggen sentana sakadi ring sor:*
'Orang yang dapat diangkat sebagai anak, seperti di bawah ini:'
 - a. *Jadma sane magama Hindu.*
'Orang yang beragama Hindu'
 - b. *Papernahan nedunang saking sang meras.*
'Kerabat yang akan mengangkat'
 - c. *Kulawarga saking sang purusa, prade tan wenten kengin saking wadon utawi pradana, yening taler ten wenten wawu kengin sakama-kama utawi saking kayun.*

'Keluarga (berstatus) laki-laki, jika tiada ada mau, boleh dari keluarga (berstatus) perempuan, jika juga tidak ada yang berkenan, baru dibolehkan sesuka-suka hati'

d. *Kautamayang saking waris pancer kapurusa.*

'Diutamakan dari keturunan (status) laki-laki'

e. *Sinalih tunggil mawiwit saking kulawarga tunggal sanggah utawi anak sewos sakawenten magama Hindu.*

'Salah satu berasal dari keluarga satu sanggah atau orang lain yang beragama Hindu'

(3) *Dados ngangkat senatana langkung ring adiri, lanang-lanang lan wadon-wadon. Prade lanang-wadon tan dados kapawiwahang.*

'Boleh mengangkat anak lebih dari satu orang, laki-laki atau perempuan-perempuan. Jika laki-laki dan perempuan tidak boleh dinikahkan'.

Ujaran pada *pawos* 60 ayat (1) mengatur tatacara pengangkatan anak. Aturan itu mengikat semua warga sehingga yang akan mengangkat anak harus sesuai dengan *awig-awig*. Oleh karena itu ujaran ayat (1) dipastikan berilokusi direktif meskipun modus ujaran yang digunakannya berita. Ujaran pada ayat (2) mengatur siapa yang dapat dijadikan anak angkat. Aturan itu memuat hirarki anak yang dapat diangkat sebagai anak. Ayat (2) ini ibarat prosedur operasional baku dalam hirarki pengangkatan anak. Oleh karena itu, ayat ini berilokusi direktif yang diungkapkan dengan modus berita. Ujaran ayat (3) mengatur jumlah dan jenis kelamin anak angkat. Di dalamnya terdapat aturan khusus, yakni pernikahan dilarang antarsaudara angkat. Dengan demikian ujaran pada ayat (3) berilokusi direktif yang direpresentasikan dengan verba tindak ujar melarang.

Oleh krama desa adat Batur Sari, Gianyar, *awig-awig* dijadikan acuan bersama dalam tata kehidupan harmonis dengan basis budaya lokal tri hita karana. Oleh karena itu, perlakuan tindak tutur pada *Sarga Sukerta Tata Pawongan* adalah adanya pemahaman dan implementasi aturan dalam *awig-awig* oleh mayoritas krama desa adat.

3.1.5 Tindak Tutur pada Sarga Wicara lan Pamidanda

Sarga wicara lan Pamidanda 'bab permasalahan dan sanksi' umumnya memuat penyelesaian permasalahan dan sanksi atas pelanggaran *awig-awig*. Pada topik penyelesaian permasalahan modus ujaran yang digunakan adalah berita untuk menegaskan pihak yang dapat mengambil keputusan atas permasalahan yang terjadi. Dengan demikian ada persesuaian antara modus dengan fungsi ujaran sehingga dapat disimpulkan bahwa topik permasalahan menggunakan lokusi tindak tutur langsung. Demikian pula, mencermati pilihan kosakata yang digunakan menyampaikan topik permasalahan umumnya bersesuaian dengan maksud ujaran itu, sehingga dapat dikatakan berlokusi literal. Dengan dua indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa topik wicara 'permasalahan' dalam *awig-awig* desa pakraman menggunakan lokusi tindak tutur langsung-literal. Untuk mendukung analisis tersebut, berikut ini disajikan data yang dikutip dari *awig-awig* Desa Adat Batur Sari, Gianyar.

Pawos 66

'Pasal 66'

- (1) *Sane wenang mawosin makadi mutusang wicara ring desa inggih punika: prajuru desa sane sinanggeh kerta desa.*
'Yang berwenang mengkaji dan memutuskan masalah di desa adalah prajuru desa yang disebut kerta desa 'majelis desa'
- (2) *Prade sang mawicara tan wenten cumpu ring pamutus kerta desa kenin nunasang wicara inucap sang rumawos.*
Jika yang berpersoalan tidak menerima keputusan majelis desa, perosoalan tersebut dapat dimintakan penyelesaian pada yang berwenang'

Ilokusi ujaran *pawos 66* ayat (1) adalah menegaskan sedangkan ayat (2) menginformasikan. Dengan demikian, ilokusi tuturan ayat (1) dan (2) di atas adalah asertif. Selain ilokusi asertif, ditemukan pula ilokusi direktif yang memerintahkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan sesuatu apabila ada wicara di desa pakraman, seperti pada *pawos 67* berikut ini.

Pawos 67

'Pasal 67'

- (1) *Sahanan wicara sane mawiwit kacorahan sakeluwira sinanggeh nungkasin daging awig-awig, perarem, miwah paswaran desa prajuru patut digelis mawosin tan nyantos pasadok.*
'Semua masalah yang termasuk kejahatan apapun yang bertentangan dengan isi awig-awig, keputusan rapat, dan kesepakatan warga para pengurus wajib segera membahasnya tidak perlu menunggu laporan'
- (2) *Sajaba wicara kadi ring ajeng, patut nyantosang pasadok sang nunas bawos.*
'Selain masalah seperti tersebut di atas, wajib menunggu laporan dari orang yang minta penyelesaian'
- (3) *Panepase patut pastika nyantenang iwang-patut malarapan tri pramana (bukti, saksi, lan ilikita).*
'Penyelesaiannya wajib memastikan salah-benar berdasarkan tri pramana (bukti, saksi, dan surat).

Ilokusi tindak tutur pada pasal 67 ayat (1) adalah memerintahkan prajuru untuk segera bertindak tanpa menunggu laporan; ayat (2) memerintahkan menunggu laporan, dan pada ayat (3) memerintahkan mengambil keputusan yang benar. Selain ilokusi direktif, seperti tersebut di atas, ditemukan ilokusi komisif yang cukup banyak pada sarga ini. Ilokusi komisif adalah untuk menyatakan sesuatu pasti terjadi pada waktu yang akan datang (Nababan, 1987; Wijana, 1996). Untuk mendukung simpulan ini disajikan kutipan data dari awig-awig banjar pakraman Baler Bale Agung, Jembrana, seperti berikut ini.

Pawos 19

'Pasal 19'

- (1) *Rikala nglaksanayang pasamuan / paruman / pesangkepan, nenten persida rauh kadanda:*
'Pada saat melaksanakan rapat, tidak bisa hadir didenda:'
 - a. *Nenten wenten pisadok, keni danda Rp 5000,00*
'Tanpa pemberitahuan, kena denda Rp 5000,00'
 - b. *Ngelepika, keni danda Rp 10.000,00*
'Menghindar, kena denda Rp 10.000,00'
- (2) *Rikala ngayah / makarya :*

- 'Pada saat gotong royong / bekerja :'
- a. *Nenten wenten pisadok, keni danda Rp 5000,00*
'Tanpa pemberitahuan, kena denda Rp 5000,00'
 - b. *Ngelepika, keni danda Rp 10.000,00*
'Menghindar, kena denda Rp 10.000,00'
- (3) *Rikala magebangan ring kaluarga sane lampus:*
'Pada saat menjaga di keluarga yang meninggal'
- a. *Nenten wenten pisadok, keni danda Rp 5000,00*
'Tanpa pemberitahuan, kena denda Rp 5000,00'
 - b. *Ngelepika, keni danda Rp 10.000,00*
'Menghindar, kena denda Rp 10.000,00'
- (4) *Nenten sareng ngerentebin ke setra (upacara pitra yadnya):*
'Tidak ikut mengantar ke kuburan (upacara pitra yadnya):'
- a. *Nenten wenten pisadok, keni danda Rp 5000,00*
'Tanpa pemberitahuan, kena denda Rp 5000,00'
 - b. *Ngelepika, keni danda Rp 10.000,00*
'Menghindar, kena denda Rp 10.000,00'
 - c. *Budal sadurung nyakcak, keni danda Rp 10.000,00*
'Pulang sebelum dipresensi, kena denda Rp 10.000,00'
- (5) *Salah sinunggil warga banjar adat Baler Bale Agung makarya biuta:*
'Salah seorang warga banjar adat Baler Bale Agung membuat masalah:'
- a. *Mawicara sane singlad, majaljal keni pamidanda pacamil Rp 50.000,00*
Berbicara yang menyimpang, bertengkar kena denda *pacamil* 'cerewet' Rp 50.000,00'
 - b. *Nyasar laksana (ngamaling, nyolong semara), keni pamidanda 100 kg berasutawi jinah Rp 850.000,00*
'Berbuat kejahatan (mencuri, berzinah), kena denda 100 kg beras atau uang Rp 850.000,00'

Ujaran yang tertera pada *pawos* 19 ayat (1) – (5) di atas merupakan sebagian kecil dari seluruh topik *pamidanda* 'perdendaan' yang ada dalam awig-awig desa pakraman. Ujaran pada *pawos* 19 ayat (1) – (5) di atas berilokusi komisif karena menyatakan kepastian pada waktu yang akan datang, jika seseorang melanggar awig-awig. Penggunaan modalitas sebagai

pemarkah lingual untuk menyatakan dimensi waktu yang akan datang dan bukan mengacu pada waktu yang lampau atau telah terjadi. Berdasarkan data yang ada dalam *awig-awig* desa, banjar, dan subak di Bali terungkap bahwa verba tindak ujar menjamin merupakan bagian dari ilokusi komisif. Dengan demikian, teori Austin (1975); Nababan (1987), Wijana (1996) yang menyatakan bahwa ilokusi komisif hanya mencakup dua verba tindak ujar, yakni berjanji dan menawarkan dapat ditambah atau dikembangkan dengan verba mempersyaratkan. Verba tindak ujar mempersyaratkan dapat memberi jaminan kepastian sesuatu akan terjadi jika yang dipersyaratkan terpenuhi. Ujaran pada *pawos* 19 ayat (1) – (5) di atas bukanlah verba tindakan mengancam karena tindakan ancaman tidak dapat dipastikan akan terjadi. Berbeda halnya dengan verba mempersyaratkan, yang pasti akan terjadi jika persyaratannya terpenuhi. Tuturan pada *pawos* 19 ayat (1) – (5) di atas, pasti terjadi jika ada krama desa yang melakukan pelanggaran seperti yang diuraikan pada ayat *pamidanda* masing-masing.

BAB IV

PENERAPAN MAKSIM KESANTUNAN BAHASA BALI

Pada bagian ini akan dikemuakan empat hal, yaitu: (1) penggunaan bahasa Bali alus sebagai penghormatan, (2) maksim kesopanan yang digunakan, (3) parameter pragmatik dominan, dan (4) penerapan prinsip kerja sama. Keempat hal itu diuraikan berikut ini.

4.1 Penggunaan Ragam Bahasa Bali Alus sebagai Penghormatan

Bahasa Bali merupakan salah satu bahasa daerah di Indonesia yang memiliki tingkatan bahasa (*speech levels*). Berdasarkan keputusan *pasamuan agung* tahun 1972 di Singaraja, ditetapkan istilah yang digunakan untuk menyatakan tingkatan bahasa Bali adalah *anggah-ungguhing basa* Bali. Secara umum, bahasa Bali terdiri dari tiga tingkat, yaitu: *basa Bali sor* ‘ragam rendah’, *basa Bali mider* ‘ragam menengah’, dan *basa Bali singgih* ‘ragam halus’. Penggunaan tingkat bahasa ini terkait dengan status pemakainya; baik status tradisional yang berupa kasta maupun status modern yang berkaitan dengan kedudukan relatif atau jabatan seseorang yang terlibat; baik sebagai orang pertama, kedua, maupun yang dibeicarakan atau orang ketiga.

Awig-awig merupakan naskah yang terkait dengan adat, agama Hindu, dan budaya Bali. Oleh masyarakat Bali, *awig-awig* sering diskralkan melalui proses *pasupati*. Tujuan penyakralan ini adalah agar semua *krama* ‘warga’ menghormati dan taat kepada *awig-awig* yang telah mereka sepakati bersama. Secara semantik, *pasupati* dapat dimaknai ‘menghidupkan’. Makna ini diinterpretasi sebagai kiasan simbolik untuk menyatakan makna ‘menghayati atau menghidupkan dalam diri’. Jadi, secara simbolik tujuan mempasupati *awig-awig* adalah menghidupkan

awig-awig itu dalam diri sertiap krama 'warga' desa pakraman. Oleh karena terhadap setiap awig-awig dilakukan proses *pasupati*, pilihan bahasa yang digunakan untuk menulis *awig-awig desa pakraman* adalah ragam bahasa Bali halus (*singgih*).

Secara pragmatik, penggunaan bahasa Bali ragam halus dalam *awig-awig* dapat diinterpretasi sebagai bentuk penghormatan kepada setiap pelibat. Penghormatan merupakan kesadaran kolektif warga yang dilembagakan melalui desa *pakraman*. Dengan proses personifikasi, desa pakraman meninggikan derajat setiap warganya melampaui batas sosial modern maupun tradisional. Strategi pilihan lingual ini dikembangkan berdasarkan psikologi sosial. Secara sosial, seseorang akan lebih sadar diri dan sadar nilai apabila kepadanya disematkan 'kehormatan'.

Contoh (Sumber: Awig-Awig Desa Pakraman Mendoyo Dangin Tukad, Jembrana)

Rikala nglaksanayang melis ke segara, upacara lan pangilen yadnya kasangga olih krama banjar adat sawewengkon Desa Adat Mendoyo Dangin Tukad, kaemet oleh prajuru desa adat (pawos 2.2)

'Manakala melaksanakan *upacara* melis ke pantai, upacara dan perlengkapannya dibawa oleh seluruh warga banjar adat desa adat Mendoyo Dangin Tukad, dipimpin oleh prajuru desa adat'

Mencermati contoh data di atas, tampak jelas pilihan leksikal dan strategi sintaksis yang digunakannya. Secara leksikal, pilihan kata yang digunakan seluruhnya menggunakan kosakata ragam hormat yang dapat dimaknai sebagai wujud penghormatan kepada seluruh warga banjar adat. Secara struktur semantis, warga diposisikan sebagai pelaku yang mengendalikan verba *nyangga* 'membawa', *kaemet* 'dipandu'. Penggunaan varian bahasa Bali halus ini dimaksudkan agar semua warga sadar dengan kewajibannya serta *prajuru* berperan sebagai peneladanya.

Strategi penghormatan untuk menumbuhkan hegemoni pun tampak pada *awig-awig banjar* adat Batur Sari, Gianyar seperti berikut ini.

Sang manggihin kahanan artha baya patut nepak kulkul mapitulung manut pawos 18 utawi sang kemalingan atur upeksa ring prajuru desa sane pacang nimbangin utawi midanda manut perarem maweweh panyangaskara (pawos 32.1)

‘Orang yang menjumpai adanya segala bentuk kemalingan wajib memukul kantong menolong sesuai pasal 18 atau orang yang kemalingan melapor kepada petugas desa yang akan mempertimbangkan atau mendenda sesuai keputusan disertai upacara penyucian’

Data yang dikutip dari pawos 32 ayat 1 *awig-awig Banjar adat* Batur Sari, Gianyar di atas berilokusi memerintah yang mengandung unsur hirarki antara penutur dengan petutur. Akan tetapi warga Banjar Batur Sari memahaminya sebagai kewajiban bersama untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayahnya. Konstruksi ujaran seperti ini terbukti efektif menumbuhkan ketaatan warga secara umum.

4.2. Maksim Kesopanan yang Digunakan

Maksim dapat dimaknai sebagai strategi atau siasat atau aturan berbahasa yang dipilih untuk mencapai tujuan. Berdasarkan data, yang dicatat dari sampel *awig-awig* terungkap bahwa maksim dominan yang digunakan adalah kebijaksanaan (*tact maxim*) dan penerimaan.

Maksim kebijaksanaan (*tact maxim*) diungkapkan dengan tuturan impositif dan komisif. Maksim kebijaksanaan ini mewajibkan setiap pelibat pertuturan meminimalkan ‘kerugian’ pada orang lain; atau wajib memaksimalkan keuntungan pada orang lain. Tuturan impositif diyakini memiliki tingkat kesopanan yang lebih tinggi sehingga menimbulkan efek penghormatan kepada pelibat.

Contoh (Sumber: *Awig-Awig Desa Pakraman Penarukan, Buleleng*)
Swadarmaning krama desa/banjar pakraman anut satinut ring sadaging awig-awig miwah paswara-paswara desa/banjar pakraman (paos 11.2)
'Kewajiban warga desa/banjar pakraman taat dan tunduk pada semua isi awig-awig dan kesepakatan-kesepakatan desa/banjar pakraman'

Krama sane magenah ring karang ayahan desa patut ngutsahayang kawentenan karange sami mangda lestari (paos 31.1)
'Warga yang mendiami tanah milik desa, wajib berusaha agar keberadaan semua tanah itu lestari'

Contoh tindak tutur pada paos 11.2 di atas menekankan dan sekaligus mengingatkan kewajiban semua warga tanpa kecuali. Diksi kunci yang digunakan adalah *swadarmaning* yang bermakna 'kewajiban mulia'. Perlokusi yang ingin dicapai dari pilihan konstruksi tutur itu adalah supaya setiap orang merasa dimuliakan jika dapat melaksanakan kewajibannya; orang mulia adalah yang dapat melaksanakan kewajibannya. Tindak tutur ini dapat dinyatakan sebagai ujaran yang mengagumkan, petutur merasa tersanjung. Secara normatif, setiap orang ingin dinilai mulia. Orang mulai tidak akan melanggar *awig-awig*; sehingga muncul dengan penggunaan bahasa Bali yang santun dapat 'menaatkan' warga pada *awig-awig*-nya.

Tindak tutur pada *pawos* 31.1 di atas pun menggunakan tuturan impositif dengan kata kunci *karang lestari*. *Lestari* bermakna 'tidak berubah; abadi'. Secara implikatural *pawos* itu bermaksud mengungkapkan "Jika Anda ingin tinggal selamanya di karang desa, maka karang desa harus tetap ada selamanya. Sebaliknya, jika karang desa itu tidak lestari, maka Anda pun tidak akan masih tinggal di sana'. Akan tetapi konstruksi kalimat yang eksplisit dan vulgar itu dijadikan pilihan. Penggunaan tuturan impositif dimaksudkan membangun ketaatan dari dalam diri seluruh warga.

Secara konsepsional, maksim penerimaan mewajibkan penutur untuk memperbesar kerugian pada diri sendiri atau

mengurangi keuntungan diri sendiri. Dalam konteks *awig-awig* ini, semua warga merupakan penutur. Hakikat *awig-awig* adalah mengikat atau mengurangi kebebasan. Keikhlasan berkurangnya kebebasan merupakan representasi penerimaan kehilangan kebebasan itu. Ini merupakan esensi penggunaan bahasa yang santun.

Contoh (Sumber : *Awig-Awig* Desa Adat Batur Sari, Gianyar)

Sahanan warga desa sane mamiara wawalungan bawi utawi banteng, patut nitenin negul utawi nglogor manda nenten ngrusak pabianan krama siosan, bilih-bilih ngletahin kahyangan (paos 30.1)

'Semua warga desa yang memelihara ternak babi atau sapi, wajib mengikat atau mengandangkan agar tidak merusak kebun orang lain, lebih-lebih menodai tempat suci'

Prade wenten wawalungan malumbar utawi ngeleb, ngrusak pekarangan utawi pabianan krama tiosan kawara kengin kataban tur kadanda ngwaliang wit sane karusak saha naur panebas papiaran manut pararem (paos 30.2)

'Jika ada peliharaan dilepas, merusak pekarangan atau kebun orang lain, ditangkap dan didenda kerugian sesuai kesepakatan (paos 30.3)

Prade jantos ngletehin linggih suci, minakadi pamrajan utawi sanggah, risampun kaparitatas olih prajuru, wenang sang nruwenang kadanda mabuhu agung tatebasan prayascita durmanggala utawi prayascita mauulu bebeb belang kalung, prade ngletehin kahyangan desa utawi pura pamaksan (paos 30.4)

'Jika sampai menodai tempat suci, seperti pamarajan atau sanggah, setelah dicermati oleh pengurus, wajib pemilik (piaraan itu) didenda membuat caru agung, tatebasan prayascita durmanggala atau prayascita menggunakan itik belang kalung, jika menodai pura milik desa atau keluarga'

Paos 30.1 – 4 di atas secara eksplisit penerapan maksim penerimaan oleh semua warga desa adat Batur Sari, Gianyar. Semua warga tunduk atas keputusan bersama itu. Mereka secara kolektif menerima kewajiban dan tanggung jawab. Konstruksi

kalimat yang digunakan adalah dengan mengedepankan keterangan syarat yang menggambarkan rangkaian hubungan sebab-akibat. Kewajiban yang harus dilakukan merupakan akibat dari kelalaiannya. Konstruksi kalimat modal ini berfungsi mengingatkan warga secara keseluruhan. Jadi, penggunaan keterangan syarat atau konstruksi kalimat modal merupakan salah satu pilihan linguistik untuk mewujudkan kesantunan hegemonis.

4.3 Parameter Pragmatik Dominan

Pemilihan tindak tutur yang digunakan dalam penulisan *awig-awig* merupakan bagian dari strategi membangun ikatan dan ketaatan sosial secara kolektif. Pilihan tindak tutur merupakan citra diri pelibat yang akan menimbulkan keadaan afektif (*affective state*) dan profil identitas (*profile of identity*). Ada dua kemungkinan citra diri yang ditampilkan, yakni muka positif (*positive face*) dan muka negatif (*negative face*).

Berdasarkan data, terungkap bahwa parameter pragmatik dominan yang digunakan dalam *awig-awig* desa *pakraman* adalah muka positif (*positive face*), yakni berorientasi pada tujuan, prestasi (kebaikan) bersama, milik bersama, atribut dan prestise bersama. Meskipun dalam *awig-awig* dicantumkan sanksi, tetapi hal itu bukan tujuan. *Awig-awig* disusun bukan untuk menakut-nakuti warganya. *Awig-awig* tidak dimaksudkan untuk mengancam warga desanya. *Awig-awig* juga tidak dimaksudkan untuk menghina warganya. Semua unsur muka negatif (*negative face*) itu tidak tercermin dalam *awig-awig*. Hal ini dibuktikan dengan pilihan ragam bahasa Bali *alus singgih* (sangat hormat).

Indikator lain yang dapat dijadikan acuan dalam penentuan parameter pragmatik pada penggunaan bahasa Bali dalam *awig-awig* desa *pakraman* adalah seperti berikut ini.

1. Penggunaan ragam bahasa Bali *alus singgih* untuk meniadakan jarak sosial, baik tradisional maupun modern, dengan meletakkan pesapa dan penyapa pada kesetaraan sosial.

2. Prajuru desa pakraman tidak diposisikan asimetris dengan warga. Hal ini dilihat dari pilihan linguistik yang digunakan dalam *awig-awig*.
3. Semua peringkat tingkat tindak tutur dalam *awig-awig* diungkapkan dengan ragam bahasa Bali alus singgih. Semua tindak tutur diberi penghormatan.

Contoh (Sumber: Awig-Awig Desa Adat Sumerta, Denpasar)

Para prajuru patut mustikayang indik piodalan miwah acin-acin kahyangan desane (paos 41.1)

'Para pengurus wajib memastikan masalah upacara dan upacara kahyangan desa ini'

Tanah palaba saha upon-uponnya, punia sane katur kalih sahanan druwen kahyangan desane sami kapastikayang miwah katitenin antuk prajuru (paos 41.2).

'Tanah harta pura dan sumbangan serta punia yang diberikan menjadi milik kahyangan desa yang dipastikan dan dipertanggungjawabkan oleh pengurus'

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa parameter pragmatik penggunaan bahasa Bali dalam *awig-awig* desa *pakraman* diwujudkan melalui varian ujaran 3 – 4, yakni: varian 3 dinyatakan sopan, dan varian 4 dinyatakan sangat sopan seperti yang diungkapkan Brown dan Levinson (1978).

4.4 Penerapan Prinsip Kerja Sama

Awig-awig dirancang untuk membangun dan mempertahankan kerja sama warga desa/banjar pakraman. Oleh karena itu prinsip kerja sama menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan pemilihan konstruksi ujaran dalam *awig-awig*. Dalam teori pragmatik dijelaskan bahwa ada empat maksim kerja sama, yaitu: maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan pelaksanaan. Maksim kuantitas menekankan kehematan konstruksi ujaran. Maksim kualitas menekankan kebenaran informasi. Maksim relevan menekankan kesesuaian topik yang dibicarakan; sedangkan maksim pelaksanaan menekankan pada

kecermatan pilhan tindak ujar yang digunakan.

Berdasarkan data, terungkap hal-hal berikut ini.

1. Pilihan tindak tutur yang digunakan dalam *awig-awig* dikonstruksi dengan tindak tutur langsung-literal. Penggunaan tindak tutur langsung literal bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman atau ketaksaan makna. Fokus informasi cenderung dikedepankan (*fronting*). Pilihan tindak tutur langsung literal dan penerapan permutasi satuan sintaksis dengan teknik *fronting* ini merupakan implementasi maksim kualitas.
2. Konstruksi kalimatnya cenderung pendek namun tetap memenuhi kriteria sintaksis bahasa Bali. Penggunaan kalimat majemuk rapatan sering ditemukan dalam *awig-awig*. Perapatan bagian-bagian yang sama merupakan strategi memperpendek kalimat. Hal ini merepresentasikan penerapan maksim kuantitas.
3. Maksim relevansi digunakan untuk memfokuskan persoalan yang akan diuraikan. Dalam hal ini tampak jelas diterapkan logika klasifikasi. Setiap sarga/palet dirinci menjadi paos. Sarga/palet paos merupakan strategi mempertahankan maksim relevansi.
4. Maksim pelaksanaan diwujudkan dengan perincian yang runtut, kalimat langsung dan literal. Tindak tutur komisif banyak digunakan untuk menyatakan kepastian dan tindak tutur asertif banyak digunakan untuk membangun informasi yang sama atau kepercayaan yang sama dengan seluruh warga desa pakraman.

Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan bahasa Bali dalam *awig-awig* desa *pakraman* secara konsisten menerapkan prinsip kerja sama (*cooperative principles*) yang dikemukakan oleh Grice (1975).

BAB V

STRUKTUR GRAMATIKAL KESANTUNAN HEGEMONIS

Pada bab ini diraikan piranti gramatikal yang digunakan untuk mewujudkan kesantunan hegemonis bahasa Bali *dalam awig-awig*.

5.1 Kajian Gramatikal Kesantunan Berahasa Bali

Dilihat dari bentuknya, *awig-awig* merupakan wacana tulis monolog (Djajasudarma, 2006:6). Wacana monolog umumnya mengutamakan keutuhan informasi. Sebagai aturan pokok pada suatu desa *pakraman*, *awig-awig* disusun untuk ditaati oleh setiap warganya. Secara sosial, hubungan vertikal ini menyebabkan dominasi lembaga desa *pakraman*. Pemertahanan dominasi tersebut membutuhkan kepatuhan dari setiap warganya melalui persetujuan (Thomas & Wareing, 2007:53). Dalam konteks wacana kekuasaan kolektif ini dibutuhkan strategi linguistik melalui penggunaan ragam bahasa Bali yang dipersepsi lebih santun. Interelasi ini dipolakan sebagai kesantunan hegemonis dalam bahasa Bali sehingga ketaatan warga terhadap *awig-awig* bukan karena ketakutan akan berbagai konsekuensi (sanksi) tetapi karena pemahaman tujuan bersama (Patria & Arief, 2015:125). Deskripsi dan eksplanasi pola-pola linguistik dalam *awig-awig* diharapkan dapat memberi kontribusi kajian pragmatik dan gramatikal yang selama ini cenderung dipisahkan.

Kajian aspek gramatikal dalam pragmatik mengacu kepada pandangan Owens (1992:15) bahwa bahasa terdiri dari tiga komponen, yakni bentuk (gramatikal), isi (semantik), dan penggunaan (pragmatik). Secara konseptual, pandangan ini menyatakan bahwa kajian terhadap penggunaan bahasa akan menjadi parsial apabila hanya ditinjau dari salah satu aspek saja. *Awig-awig* merupakan salah satu wujud nyata penggunaan

bahasa Bali sehingga setiap konstruksi kalimat dalam *awig-awig* tidak terpisahkan dengan konteks penggunaan yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, penjelasan terhadap konstruksi kalimat dalam *awig-awig* perlu mempertimbangkan aspek fungsional, yang banyak dikaji dalam pragmatik (Leech, 1993: 70). Kajian gramatikal dalam pragmatik akan menelaah data (korpus) dari dua sisi, yakni aspek bentuk dan pemetaannya pada konteks penggunaan. Pendekatan gramatikal bertujuan menjelaskan konstruksi sintaksis sebagai presentasi kesantunan hegemonis bahasa Bali dalam *awig-awig*. Kajian ini diharapkan dapat mengungkapkan pemarkah dan pola linguistik yang digunakan untuk membentuk dan memelihara harmoni sosial (Piller, 2016:28).

Kesantunan berbahasa merupakan norma sosial sebagai acuan standar yang disepakati. Kesantunan berbahasa merupakan refleksi sikap toleran yang harus dipahami untuk membangun dan memelihara hubungan baik (Huang, 2008:97). Kesantunan berbahasa merupakan prinsip retorika yang memanfaatkan ekspresi linguistik dalam hubungan sosial untuk menunjukkan penghargaan terhadap partisipan (Grundy, 2000:145). Penerapan prinsip tersebut melatarbelakangi pemolaan klausa sebagai wujud perilaku linguistik. Oleh karena itu, analisis setiap pola klausa dan/atau kalimat dalam teks *awig-awig* penting mempertimbangkan variabel-variabel yang memunculkannya dalam konteks kewacanaan yang lebih luas. Hubungan pola gramatikal dan konteks merupakan fokus studi pragma-gramatikal.

Kesantunan dipandang sebagai relasi daya dengan makna yang diukur dengan skala untung – rugi yang tergantung pada konteks (Leech, 1993:166). Artinya, sebuah konstruksi sintaksis bisa saja menguntungkan dalam suatu konteks, tetapi merugikan pada konteks yang lain; seperti data berikut ini.

Pradé wénten krama sané mamaling barang sinanggeh suci, tur sampun prasida kapastika wenang dinanda, tur patut ngwaliang barang sinanggeh suci punika rauhing prabéa pangupakara prayascita manut dresta (Awig-awig Desa Pakraman Penarukan,

P 39:2.)

‘Jika ada warga yang mencuri benda suci, dan sudah dapat dipastikan harus didenda dan wajib mengembalikan benda suci itu serta biaya penyuciannya sesuai tradisi’

Data *pawos* 39:2 di atas menggunakan modus pengandaian. Secara semantik, data tersebut dapat dikonstruksi dengan menggunakan modus pernyataan melalui pelepasan keterangan syarat dan unsur aspek sehingga menjadi, seperti berikut ini.

Krama sané mamaling barang sinanggeh suci wenang dinanda tur patut ngwaliang barang sinanggeh suci punika rauhing prabéa pangupakara prayascita manut dresta.

‘Warga yang mencuri benda suci harus didenda, dan wajib mengembalikan benda suci itu serta biaya penyuciannya sesuai tradisi’

Kalimat *pawos* 39:2 dan modifikasinya mempresentasikan makna yang sama. Unsur subjek kalimat modifikasi lebih eksplisit sehingga menjadi lebih efektif daripada kalimat asli *pawos* 39:2. Kekaburan fungsi subjek pada kalimat asli *pawos* 39:22 justru disebabkan oleh pengedepanan keterangan syarat *pradé wénten* ‘jika ada’. Akan tetapi secara sosio-psikologis, oleh para informan dikatakan bahwa pola kalimat asli pada *paos* 39:22 dipersepsi lebih santun daripada pola kalimat modifikasi. Kalimat seperti pada teks asli *paos* 39:22 di atas diyakini lebih memiliki daya daripada kalimat modifikasinya. Inilah fakta yang menunjukkan bahwa aspek pragmatik berelasi dengan gramatikal. Pilihan gramatikal sangat tergantung pada urgensi pragmatiknya. Dalam konteks ini, keterangan syarat bukan merupakan kebutuhan yang diharuskan oleh kaidah sintaksis dan semantik tetapi sebagai strategi kesantunan hegemonis untuk memunculkan daya pragmatiknya (Arnawa, dkk., 2017:33).

Kesantunan berbahasa terkait erat dengan kearifan lokal yang bersumber dari nilai sosial budaya dan keyakinan masyarakat bahasa tertentu (Sumarsono, 2010:143). Setakat

dengan ini, Olaniyi (2017:59) mengatakan bahwa terdapat kaitan erat antara budaya dan komunikasi. Budaya berpengaruh pada keberterimaan dan kesesuaian pilihan ujaran. Jie dan Feife (2016:38) menegaskan bahwa dimensi sosial dan budaya dapat memfasilitasi prinsip kesantunan untuk mencapai perlokusi komunikasi yang diharapkan. Kesantunan selalu dipertimbangkan untuk menentukan pilihan konstruksi linguistik dalam setiap komunikasi (Wang, 2009:286). Kesantunan berbahasa tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan perspektif tindak ujar yang melibatkan konsep implikatur dan prinsip kerja sama (Nababan, 1987:33). Hal ini pun ditegaskan Liu (2017:563) bahwa prinsip kerja sama dan kesantunan sangatlah penting dalam tindak bahasa. Sebagai teori penggunaan bahasa, implikatur mempertimbangkan pilihan struktur gramatikal bahasa sebagai kaidah yang bersifat sistemik. Hubungan gramatikal dengan fungsi komunikasi berujung pada penyatuan teori linguistik dan pemetaanya untuk fungsi-fungsi komunikatif tertentu. Hubungan ini melahirkan pendekatan hibrida yang disebut *pragma-gramatikal*. Deskripsi sintaksis dan leksikal merujuk pada kebermaknaan dalam implikatur percakapan (Levinson, 1989:162). Sejalan dengan konsep ini, Bach & Harnish (1979:85) mengatakan bahwa analisis linguistik sangatlah esensi untuk menjelaskan lokusi ujaran.

Mengacu pandangan para pakar di atas, secara spesifik, kajian bagian ini bertujuan mengungkapkan peran struktur semantik leksikal dan pola sintaksis bahasa Bali untuk mewujudkan kesantunan hegemonis dalam *awig-awig*. Kesantunan berbahasa dilihat dari perspektif penutur dan orang lain yang dipresentasikan melalui pilihan klausa atau kalimat. Sebagai sebuah perspektif, kesantunan berbahasa sangat terkait dengan parameter pragmatik, yang meliputi tingkat jarak sosial, tingkat status sosial, dan tingkat perinkat tindak ujar. Parameter pragmatik ini menghasilkan empat gradasi kesantunan yang berbeda, yakni: (1) kurang santun, (2) agak santun, (3) lebih santun, dan (4) paling santun (Wijana, 1996:65). Konsep teoretis ini sangat relevan dengan eksistensi bahasa Bali yang memiliki

angguh-ungguhing basa ‘tingkatan bahasa’ dan dialek geografis yang beragam. Secara umum penggunaan bahasa Bali ragam halus dinilai sebagai wujud penghormatan terhadap petutur sehingga dipersepsi lebih santun daripada penggunaan ragam madya dan rendah. Realitas budaya bahasa ini akan dibuktikan dalam *awig-awig desa pakraman*.

5.2 Struktur Semantik Leksikal dan Kesantunan Hegemonis

Setiap kata memiliki konfigurasi komponen makna. Konfigurasi komponen makna merupakan struktur semantik yang menentukan kebutuhan gramatikal sintaksis kata itu. Kalimat atau klausa yang mengingkari struktur semantik leksikal menyebabkan klausa atau kalimat itu tidak gramatikal. Pembatasan-pembatasan gramatikal sesungguhnya dapat ditelusuri melalui analisis struktur semantik leksikal (Arnawa, 2016:46). Namun demikian, untuk mencapai daya pragmatik, penyesuaian struktur semantik leksikal banyak digunakan dalam teks *awig-awig desa pakraman*, seperti data berikut ini.

- (1) *Désa miwah banjaré mapawéh leluputan ayah utawi pakenan-kenan ring sang inggiling linggih utawi sané kawelas asihin (Awig-awig Desa Pakraman Sumerta, p 32.1).*
‘Desa dan *banjar1* memberi pembebasan kewajiban atau urunan kepada para pemimpin atau yang dikasihani’.
- (2) *Banjaré wenang ngardi awig-awig ngamanggehang tata carané nyangra pakaryan kramané munggah ring ajeng (Awig-awig Desa Pakraman Sumerta, p 71.2).*
‘Banjar berhak menyusun peraturan (untuk) mengukuhkan tatacara melaksanakan kegiatan warga seperti tersebut di atas’
- (3) *Banjar utawi désa wenang niwakang pamidanda ring wong désané sané sisip (Awig-awig Desa Pakraman Sumerta, p 78.1).*
‘Banjar atau desa berhak memberi sanksi kepada warga desa ini yang bersalah’
- (4) *Wicara ring désa pakraman, yogya kapidanda antuk désa. Dadandan mantuk ka désa (Awig-awig Desa Pakraman Menaga, p 51.1.ha).*

'Pelanggaran di desa adat, wajib didenda oleh desa.
Dendanya masuk ke desa'

- (5) *Banjar pakraman, pamaksan, subak, sekaa-sekaa sané wénten sajeroning Désa Pakraman Menaga wenang ngawangun awig-awig, perarem sowang-sowang, nanging dagingipun tan yogya tungkas ring awig-awig Désa Pakraman Menaga (Awig-awig Desa Pakraman Menaga, p 53.3).*

'Banjar adat, paguyuban, subak, organisasi-organisasi yang ada di lingkungan Desa Adat Menaga berhak membuat peraturan, kesepakatan masing-masing, tetapi isinya tidak boleh bertentangan dengan awig-awig Desa adat Menaga'

Data (1 - 5) di atas memberi gambaran korpus kalimat bahasa Bali dalam *awig-awig* desa *pakraman*. Pengungkapan fenomena kesantunan hegemonis data (1 - 5) tersebut dilandasi teori struktur semantik, yang berpijak pada nomina dan verba (Cafe, 1973:10). Telaah struktur semantik berpijak pada analisis komponensial untuk mengungkap fitur semantik nomina dan verba yang akan menentukan kegramatikalannya suatu kalimat. Relasi nomina dengan verba menggambarkan peran semantik argumen pada sebuah klausa/ kalimat. Givon (1984 : 56) menjelaskan bahwa struktur semantik nomina relatif stabil yang digambarkan dengan hierarki [ENTITAS > TEMPORAL > KONKRET > BERNYAWA > INSAN, yang artinya jika suatu nomina yang memiliki fitur paling kanan, yakni [+INSAN] pasti memiliki semua fitur di sebelah kiri; sebaliknya jika hanya memiliki fitur paling kiri, yakni [+ENTITAS] pasti nomina itu tidak memiliki semua fitur di sebelah kanannya.

Dalam kajian sintaksis, verba menjadi kepusatan semantik untuk menentukan argumen suatu kalimat. Berdasarkan fitur semantik DINAMIS, PERFEKTIF, dan FUNGTUAL, verba dibedakan menjadi tindakan, proses, dan keadaan, yang dapat ditabulasi seperti berikut.

Tabel 1. Tipe dan Fitur Semantik Verba

| Tipe \ Fitur | DINAMIS | PERFEKTIF | PUNGTUAL |
|--------------|---------|-----------|----------|
| Tindakan | + | + | + |
| Proses | + | - | - |
| Keadaan | - | - | - |

Berpijak pada teori struktur semantik tersebut, aspek gramatikal data (1 – 5) dapat dijelaskan berikut ini.

Data (1 – 3, dan 5) merupakan kalimat aktif dengan subjek berperan sebagai agen. Data (4) merupakan kalimat majemuk rapatan sama predikat. Inti struktur semantik data (1) terletak pada nomina desa dan *banjar* serta verba *mapawéh* ‘memberi’. Nomina desa dan *banjar* memiliki fitur semantik [+KONKRET]. Dengan fitur semantik tersebut, nomina desa dan *banjar* tidak mungkin sebagai agen untuk melakukan verba tindakan *mapawéh*, yang mewajibkan argumennya berfitur [+INSAN]. Hal yang sama pun terjadi pada data (2), (3), dan (5) karena semua peran semantik agen pada ketiga data ini diderivasi dari nomina *banjar* dan desa yang berfitur semantik [-INSAN]. Sedangkan struktur verba *ngardi* ‘membuat’ (data 2), *niwakang* ‘menghukum’ (data 3), dan *ngawangun* ‘menyusun’ (data 5) membutuhkan argumen dengan fitur semantik [+INSAN]. Penyimpangan struktur semantik yang terjadi pada data tersebut dimotivasi oleh faktor pragmatis. Penutur asli bahasa Bali memilih konstruksi kalimat seperti data (1 – 3), dan (5) untuk mencapai daya pragmatik. Dikatakan demikian karena dalam budaya Bali ketaatan warga terhadap lembaga adat sangatlah tinggi. Kearifan lokal ini diimplementasikan dalam penyusunan *awig-awig* sehingga konstruksi-konstruksi kalimat yang digunakan diharapkan dapat mewujudkan daya pragmatik kesantunan hegemonis. Atas pertimbangan pragmatis tersebut,

desa dan *banjar* diberi peran semantik sebagai agen, meskipun menyimpang dari struktur semantik nomina dan verba.

Penggunaan nomina *banjar* dan *desa* yang berfitur semantik [- INSAN] untuk melakukan verba tindakan *mapawéh* ‘memberi’, *ngardi* ‘membuat’, *niwakang* ‘menghukum’, dan *ngawangun* ‘menyusun’ merupakan upaya personifikasi karena pada kenyataannya yang melakukan verba tindakan tersebut adalah nomina [+INSAN] seperti *klian desa* ‘ketua desa adat’, *klian banjar* ‘kepala banjar adat’ *prajuru* ‘pengurus’, dan/atau *krama* ‘warga’, sehingga agen pada data (1 – 3) dan (5) dapat diganti dengan salah satu nomina berpitur semantik [+INSAN] tersebut. Data (1), misalnya, dapat saja dikonstruksi menjadi berikut ini, tanpa mengubah pengertiannya.

- (1a) Kelian *désa* miwah kelian banjaré mapawéh leluputan ayah utawi pakenan-kenan ring sang inggiling linggih utawi sané kawelas asihin (*Awig-awig Desa Pakraman Sumerta*, p 32.1).
‘Kepala desa adat dan *klian banjar adat* memberi pembebasan kewajiban atau urunan kepada para pemimpin atau yang dikasihani’.

Namun demikian, konstruksi kalimat (1a) tidak menjadi pilihan karena ingin memanfaatkan kearifan lokal akan ketaatan warga pada lembaga adat sehingga kesantunan hegemonis dapat terwujud. Kecuali ketaatan warga pada lembaga adat, dalam budaya tutur masyarakat Bali, ujaran tidak langsung maupun tidak literal dinilai lebih sopan daripada tuturan langsung maupun literal. Mengacu pada Wijana (1996: 32), data (1) termasuk pada tuturan tidak literal. Oleh karena itu, mempersonifikasikan lembaga adat seperti *desa* dan *banjar* dapat mewujudkan kedua kearifan lokal tersebut.

Data (4) terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama pada data ini menggunakan konstruksi pasif, melalui memetakan fungsi objek dengan peran semantik agen. Verba data (4) kalimat pertama adalah *kapidanda* ‘didenda’ dengan slot objek pelaku

yang diisi dengan nomina *desa* yang berfitur semantik [-INSAN]. Terhadap data ini, analisis yang sama seperti data (1 – 3) dan (5) dapat diterapkan. Perbedaannya hanya pemetaan agen terletak pada fungsi objek. Konstruksi data (4) semakin memperkuat simpulan bahwa dalam penyusunan *awig-awig*, kesantunan hegemonis dapat diwujudkan dengan memanfaatkan kepatuhan warga terhadap lembaga adat serta nilai etika, bahwa tuturan tidak langsung dan atau tidak literal dipersepsi lebih santun oleh penutur bahasa Bali. Kecuali itu, penggunaan ragam bahasa Bali *alus singgih* ‘ragam hormat tinggi’ pun mendorong kesantunan hegemonis karena ragam ini merupakan wujud penghormatan terhadap partisipan.

5.3 Pola Sintaksis dan Kesantunan Hegemonis

Strategi lain yang digunakan untuk mewujudkan kesantunan hegemonis bahasa Bali dalam *awig-awig* adalah pola sintaksis elipsis, terutama pada topik tutur tentang kewajiban *krama* ‘warga’. Kewajiban *krama* merupakan tanggung jawab, yang oleh sebagian warga sering dirasakan sebagai ‘beban’ sehingga pengungkapannya membutuhkan strategi linguistik untuk mencapai efek kesantunan hegemonis. Berikut ini disajikan data penggunaan pola elipsis untuk mencapai efek pragmatik tersebut.

- (6) *Pradé palas riwekasan kacihnian adung malih, patut: (a) nglaksanaang upacara pawiwahan malih; (b) kadanda nikel saking palasé (Awig-awig Desa Pakraman Batarsari, p 55).*

‘Jika setelah bercerai keesokan hari rujuk kembali, wajib:

- (a) melaksanakan upacara pernikahan kembali; (b) didenda dua kali lipat sejak perceraian’
- (7) *Pradé wusan nandur, sudurung tugtug panamaya tan wenang: (a) ngangon bébék, ayam, utawi ubuh-ubuhan suku pat ring sajeroning carik; (b) ngrereh pici-pici lan jejukutan séwos ring saihan carik; (c) ngrereh lindung ngruawak pundukan wiadin nyuluh; (d) nuba ulam (Awig-awig Subak Ketug-Ketug, p 30).*

- 'Jika setelah menanam, sebelum cukup waktunya dilarang:
- (a) mengembala itik, ayam, atau ternak berkaki empat di sawah;
 - (b) mencari siput dan sayur-sayuran lain di sawah;
 - (c) mencari belut membongkar pematang dan *nyuluh*;
 - (d) meracuni ikan'.
- (8) *Rikala nglaksanayang pasamuhan/paruman/pasangkepan, nénten prasida rauh, patut kadanda: (ha) nénten pisadok, keni danda Rp 5.000,00; (na) nglepika , keni danda Rp 10.000,00 (Awig-awig Banjar Pakraman Balér Balé Agung, p 19.1)*
- 'Manakala melaksanakan rapat, tidak bisa hadir wajib didenda: (a) nenten pisadok, kena denda Rp 5.000,00; (b) membangkang, kena denda Rp 10.000,00'.

Data (6 – 8) disusun menggunakan pola elipsis. Dalam telaah wacana pragmatik, bagian yang dilesapkan adalah informasi yang sudah diketahui pelibat (Lubis, 1993). Untuk mengetahui informasi yang lesap dapat menerapkan penafsiran lokal (Djajasudarma, 2006:45). Pada data (6 – 8) fungsi sintaksis yang dilesapkan adalah subjek, yang secara sintaksis fungsi itu sangat dibutuhkan karena predikatnya diisi dengan verba tindakan. Melalui penafsiran lokal dapat diketahui bahwa subjek data (6 – 8) adalah *krama* 'warga'. Dilihat dari aspek kewacaan kalimat pada data (6 – 8) dapat mempertahankan kohesi dan koherensinya. Namun demikian, hal lain yang perlu diungkap dari penerapan pola elipsis ini adalah pesan budaya yang ada di balik pola sintaksis tersebut (Arnawa, dkk, 2018b).

Desa dan *banjar pakraman* merupakan lembaga adat yang berbasis *panyamabrayaan* 'persaudaraan' yang berpedoman pada falsafah *sagilik saguluk salunglung sabayantaka* 'bersatu padu menyusun kekuatan untuk menghadapi bahaya'; *paras-paros sarpanaya* 'memutuskan sesuatu secara musyawarah mufakat'; dan *saling asah, saling asih, saling asuh* 'saling mengingatkan, saling menyayangi, dan saling membantu'. Falsafah ini berhasil membangun ikatan sosial yang kuat di dalam *pakraman* sehingga desa dan banjar berciri kehidupan yang kolegal. Kekuatan sosial ini juga dilandasi ajaran etika, yang merupakan salah satu unsur

kerangka agama Hindu, yakni *tat twam asi* yang bermakna 'aku adalah kamu dan kamu adalah dia' yang menyiratkan makna bahwa kita semua sama. Dalam cakupan yang lebih luas ajaran etika diperkuat oleh upanisad *Brahman atman aikyam* yang bermakna semua roh (jiwa) berasal dari Tuhan. Semua pedoman filosofis tersebut menjadikan desa dan *banjar pakraman* sebagai lembaga yang komunal, bersifat kolektif dan kolegal.

Implementasi budaya komunal yang bersifat kolektif dan kolegal sering dipresentasikan melalui pelesapan agen dalam struktur kalimat dalam *awig-awig*. Data (6 - 8) di atas merupakan petunjuk lingual bahwa elipsis agen bukan semata-mata pertimbangan aspek linguistik, tetapi mengandung motivasi budaya. Analisis lain yang bisa diberikan atas penggunaan pola elipsis itu adalah penonjolan tindakan yang dipresentasikan dengan verba tindakan dalam bahasa Bali. Hal ini sangat sejalan dengan teori struktur semantik bahwa kepusatan semantik kalimat terletak pada verbanya. Dikaitkan dengan prinsip kesantunan bahwa penggunaan tuturan impositif dapat memperbesar keuntungan pada orang lain; serta teori penyelamatan muka untuk mengurangi ancaman pada seseorang. Dengan mengelipsiskan agen seperti data (6 - 8) tuturan dipersepsi lebih santun karena dapat menyelamatkan muka orang lain dan dinilai lebih bijaksana (*tact maxim*). Jadi, pelesapan agen pada kalimat untuk menyatakan tindakan pelanggaran atau citra negatif lainnya, merupakan strategi membangun kesantunan hegemonis bahasa Bali dalam *awig-awig*. Sebaliknya tidak akan terjadi pelesapan agen apabila kalimat itu digunakan untuk menyatakan tindakan yang bercitra positif, seperti data berikut ini.

(9) *Sadurungé ngranjing ring pakubon, sang lanang patut ngawéntenang pabyakala (Awig-awig Desa Pakraman Alapsari, p 49.c)*

'Sebelum masuk ke rumah, pengantin pria wajib menyetenggarakan upacara pembersihan diri'

(10) *Sang sapa sira hugi krama désa myara watek suku*

kalih, watek makampid, yatnain ugi mangda ten banget ngarucakin ngaletihin palemahan, pomahan, tatanduran druén anak sios (Awig-awig Desa Pakraman Menaga, p 29.3).

‘Siapa pun warga desa yang memelihara hewan berkaki dua, hewan bersayap, awasi benar agar tidak sangat mengganggu, mengotori pekarangan, perumahan, tatanaman milik orang lain’

- (11) *Krama utawi banjar dados nyarad banjar tiosan risampun polih panugrahan saking prajuru désa (Awig-awig Desa Pakraman Rendang, p 35.5).*

Warga atau banjar boleh membantu banjar lain setelah mendapat izin dari pengurus desa’.

BAB VI

TEMUAN, SIMPULAN, DAN SARAN

Pada bab ini dikemukakan tiga hal, yaitu: (1) temuan penelitian, (2) simpulan, dan (3) saran. Ketiga hal itu diuraikan berikut ini.

6.1 Temuan Penelitian

Patria dan Arief (2015) menegaskan bahwa menurut Gramsci ketaatan atau hegemoni dapat dikembangkan melalui dua cara, yakni melalui **kekuasaan** dan **keteladanan**. Kekuasaan dapat dimaknai penerapan hukum secara ketat dan kaku; sedangkan keteladanan dimaknai sebagai tindakan perberian contoh oleh pemimpin untuk menimbulkan dampak ikutan bagi warga. Teori ini berfokus pada pimpinan atau kekuasaan sebagai pusat agen pengendali sosial dan mengabaikan peran warga. Pada sisi lain warga adalah subjek sosial yang dapat menimbulkan perubahan.

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa **penghormatan** merupakan salah satu strategi hegemonis. Penghormatan itu dapat diwujudkan dengan menggunakan pilihan ujaran yang impositif sehingga menimbulkan kekaguman dan ketersanjungan publik. Penghormatan juga merupakan wujud apresiasi pemimpin terhadap warga terpimpim. Penghormatan merupakan strategi pengelolaan psikologis masyarakat. Penghormatan kepada warga merupakan pergeseran orientasi pembentukan hegemoni sosial dari kekuasaan ke masyarakat pada umumnya. Penghormatan itu dapat diwujudkan dengan penggunaan pilihan aras tutur yang dipersepsi lebih dan sangat sopan. Dalam penelitian ini digunakan ragam bahasa Bali *alus singgih*. Penggunaan ragam bahasa Bali *alus singgih* menunjukkan penghormatan penutur kepada petutur dengan parameter pragmatik muka positif (*positive face*). Fakta lingual

ini ternyata berhasil membangun kesantunan hegemonis.

Instrumen pragmatik lain yang digunakan untuk membangun kesantunan hegemonis adalah lokusi tindak tutur taklangsung – literal. Dalam penelitian ini terungkap bahwa ilokusi **direktif** yang dinyatakan dengan **kalimat berita** dapat menumbuhkan ketaatan karena oleh masyarakat luas dinilai lebih sopan daripada lokusi tindak tutur langsung-literal. Demikian pula, penggunaan keterangan modal atau syarat dalam mengkonstruksi tindak tutur komisif dinilai lebih santun daripada tanpa keterangan modal itu.

6.2 Simpulan

Bedasarkan hasil analisis data dapat dirumuskan simpulan sementara berikut ini.

1. Kesantunan hegemonis penggunaan bahasa Bali dalam *awig-awig* pakraman dilakukan dengan instrumen linguistik berikut ini.
 - (a) Penggunaan ragam bahasa Bali *alus singgih* dimaksudkan untuk merepresentasikan maksim kebijaksanaan (*tact maksim*) dan penerimaan untuk membangun ketaatan (hegemoni) sosial. Ragam bahasa Bali *alus* merupakan representasi penghormatan terhadap petutur. Penghormatan merupakan salah satu cara untuk membangun kesantunan hegemoni.
 - (b) Penggunaan lokusi tindak tutur taklangsung – literal dimaksudkan untuk menyatakan ilokusi direktif. Hal ini dipandang sebagai kesantunan oleh masyarakat Bali.
 - (c) Penggunaan verba tindak ujar mempersyaratkan untuk menyatakan ilokusi komisif. Penggunaan keterangan modal merupakan salah satu strategi sintaksis untuk menyatakan kesantunan. Hal ini sejalan dengan kosep *tatakan raos* 'landasan berbicara' dalam budaya Bali.

2. Parameter pragmatik dominan adalah muka positif (*positive face*) untuk mewujudkan kesetaraan dan kehormatan secara kolektif. Kesetaraan dan kehormatan kolektif diyakini menumbuhkan kepatuhan di luar kesadaran individu.
3. Semua maksim kerja sama diterapkan pada penggunaan bahasa Bali dalam *awig-awig* desa pakraman.
4. Pola sintaksis dan kaidah struktur semantik leksikal merupakan instrumen gramatikal yang digunakan untuk membangun kesantunan hegemonis dalam bahasa Bali.

6.3 Saran

Penelitian ini menghasilkan temuan yang masih bersifat hipotesis. Oleh karena itu perlu ada penelitian lanjutan untuk membuktikan kebenarannya. Jika temuan hipotesis itu terbukti makna teori hegemoni yang dikembangkan selama ini dapat dikoreksi. Bahwa penghormatan petutur merupakan strategi efektif untuk membangun kesantunan hegemonis, bukan hanya kekuasaan dengan penerapan hukum atau keteladanan pemimpin yang semata-mata berorientasi pada kekuasaan. Masyarakat kolektif dapat membangun hegemoni secara internal jika mendapat penghormatan melalui penggunaan bahasa Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnawa, N. 2008. *Wawasan Linguistik dan Pengajaran Bahasa*. Denpasar: Pelawa Sari.
- Arnawa, N. 2014. Penggunaan Pemarkah Negatif dalam Ujaran: Strategi Kesantunan Berbahsa Bali. *Prosiding Seminar Nasional*, IHDN Denpsar, 64 -68.
- Arnawa, N. 2016. 'Interpretasi Pragmatis Analogis Metafora Bahasa Bali'. *Jurnal Kajian Bali*, 6(1), 59 – 80. Diunduh tanggal 3 Februari 2017 dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/19896/13213>
- Arnawa, N. 2016. Struktur Semantik dan Pembatasan Gramatikal: Studi Kasus pada Kalimat Bahasa Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya IV*. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, hal 43 – 52.
- Arnawa, N; Gunartha, I. W; dan Sadwika. I. N. 2017. The use of modality markers to perform hegemony politeness in using Balinese language: a case study on *Awig-awig*. *Journal of Applied Studies in Language*, 1(1), 32 – 37. Diunduh tanggal 20 Desember 2017 dari <https://ojs.pnb.ac.id/index.php/JASL/article/view/670>
- Arnawa, N; Gunartha, I.W; dan Sadwika, I.N. 2018a. Pragma-Gramatikal Kesantunan Hegemonis Bahasa Bali dalam *Awig-Awig*. *Bahasa dan Seni*, 46(2), 143 – 152 Diunduh tanggal 26 Agustus 2018 dari <http://journal2.um.ac.id/index.php/jbs/article/view/3942>
- Arnawa, N; Gunartha, I.W; dan Sadwika, I.N. 2018b. Balinese Hegemonic Politness in *Awig-Awig* of *Desa Pakraman*. *Theory and Practice in Language Studies*, 8(11), 1485 – 1493 Diunduh tanggal 8 Nopember 2018 dari <http://academypublication.com/issues2/tpls/vol08/11/13.pdf>
- Arnawa, N; Gunartha, I.W; dan Sadwika, I.N. 2018c. Maksim Kebijakan (Tact Maxim) Bahasa Bali dalam *Awig-Awig* Desa Pakraman. *Prosiding Senarilip II*. 59 – 65.
- Austin, J.L. 1975. *How To Do Things With Words*. Oxford – New

York:Oxford University Press.

- Aziz, A. E. 2003. 'Relasi Kesantunan Berbahasa Antargenerasi dalam Masyarakat Indonesia'. *Pelbba 16*. Jakarta : Unika Atma Jaya.
- Bach, K and & Harnis, R. M. 1979. *Linguistic Communication and Speech Acts*. Cambridge: The Mit Press.
- Chafe, W.L. 1970. *Meaning and The Structure of Language*. Chicago :The University of Chicago Press.
- Djajasudarma, T. F. 2006. *Wacana: Pemahaman dan Hubungan Antarunsur*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Grundy, P. 2000. *Doing Pragmatics*. New York: Oxford University Press.
- Givon, T. 1984. *Syntax: A Functional-Typological Introduction*. Philadelphia: John Benjamins.
- Gunarwan, A. 1992. 'Persepsi Kesantunan Direktif di dalam Bahasa Indonesia di antara Beberapa Kelompok Etnik di Jakarta'. *Pelbba 5*. Jakarta : Unika Atma Jaya.
- Huang, Y. 2008. Politeness Principle in Cross-Culture Communication. *English Language Teaching*, 1(1), 96 – 101. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1082589.pdf>
- Jie, W. and Feife W. 2016. The Application of Politeness Principle in the Analysis of Drama: Take Taehouse as an Example. *Cross- Cultural Communication*, 12 (5), 35 – 38. Diunduh tanggal 23 Juni 2017 dari <http://cscanada.net/index.php/ccc/article/viewFile/8376/9412>
- Jendra, I W. 1999. 'Etika Berbicara dalam Sastra Hindu (Analisis Religiosiolinguistik)'. Denpasar : Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap Universitas Udayana.
- Latif, Y; dan Ibrahim, I. S. 1996. *Bahasa dan Kekuasaan*. Bandung: Mizan
- Leech, G. 1983. *Principles of Pragmatics*. London: Longman.
- Levinson, S.C. 1989. *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Liu, L. 2017. Application of Cooperative Principle and Politeness Principle in Class Question-answer Process. *Theory and Practice in Language Studies*, 7 (7), 563 – 569. Diunduh tanggal 4 Maret 2018 dari <https://www.academypublication.com/issues2/tpls/vol07/07/10.pdf>
- Lubis, A.H.H. 1993. *Analisis Wacana Pragmatik*. Badung: Angkasa.
- Marzuki.1986. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII.
- Mashun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nababan, P.W.J. 1987. *Ilmu Pragmatik (Teori dan Penerapannya)*. Jakarta : P2LPTK.
- Olaniyi, K. 2017. Politeness Principle and Ilorin Greetings in Nigeria: A Sociolinguistic Study. *International Journal of Society, Culture & Language*, 5(1), 58 – 67. Diunduh tanggal 6 Mei 2018 dari http://www.ijsc.net/article/24931_3dbd4a7da53b6a9e00d0870afa3bb8e9.pdf
- Owens, Jr. R.E. 1992. *Language Development An Introduction*. New York: macmillan Publishing Company.
- Patria, N. dan Arief A. 2015. *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 1992. Diunduh tanggal 4 Februari 2016 dari <https://jdih.go.id/files/423/2004perda0051002.pdf>
- Piller, I. 2016. Monolingual way of seeing multilingualism. *Journal of Multicultural Discourses*. 11(11), 25 – 33. Diunduh tanggal 28 Juni 2017 dari <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17447143.2015.1102921>
- Simpem, I W. 2008. *Sopan Santun Berbahasa Masyarakat Sumba Timur*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Sumanto. 1995 , *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Soemarmo, M. 1988. 'Pragmatik dan perkembangan mutakhirnya'. Dalam Soenjono Dardjowidjoyo, (ed.), *PELLBA I*, 157 – 215. Jakarta : Unika Atma Jaya Press.

- Sumarsono. 2010. *Buku Ajar Pragmatik*. Singaraja: Unit Penerbitan Undiksha.
- Wijana, I D.P. 1996. *Dasar-Dasar Pragmatik*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Thomas, L. dan Warieng, S. 2007. *Bahasa, Masyarakat dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wang, Z. 2009. Raising and Lowering Speaker's or Hearer's Position in the Politeness Principle in Intercultural Communication. *Intercultural Communication Studies Vol. XVIII No. 1*, hal. 286 – 291. Diunduh tanggal 8 September 2017 dari <https://www-s3-live.kent.edu/s3fs-root/s3fs-public/file/18-Zhenping-Wang.pdf>
- Wijana, I D.P. 1996. *Dasar-Dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi.

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

| | | |
|---------------------|---|---|
| Judul Penelitian | : | Kesantunan Hegemonis Bahasa Bali dalam <i>Awig-Awig Desa Pakraman</i> |
| Sumber Dana | : | DRPM Kemenristek Dikti, SP DIPA-042.06.401516/2018 |
| Tim Peneliti | : | 1. Dr. Nengah Arnawa, M.Hum. (Ketua) 2. Dr. I Wayan Gunartha, M.Pd. (Anggota) 3. I Nyoman Sadwika, S.Pd., M.Pd. (Anggota) |
| PT Pengusul | : | IKIP PGRI Bali |
| Nama Informan | : | |
| Keterangan Informan | : | |
| Tanggal Wawancara | : | |

Daftar Pertanyaan

I. Persepsi tentang *Awig-Awig*

- Menurut Bapak, apakah *awig-awig* efektif untuk menjaga keberadaan desa pakraman?
 - Efektif :
.....
.....
.....
 - Tidak efektif :
.....
.....
.....
- Menurut Bapak, bagaimanakah ketaatan krama terhadap *awig-awig* desa pakraman?
 - Sangat taat b. Cukup taat c. Kurang taat
.....
.....
.....
- Dalam *awig-awig*, termuat kewajiban, hak, dan sanksi krama. Seberapa sering sanksi adat diterapkan terhadap krama?
 - Sangat jarang b. Jarang c. Sering

.....
.....
.....

4. Sanksi apakah yang sering/pernah diterapkan terhadap warga (misalnya: denda, teguran)?

.....
.....
.....

5. Menurut Bapak, faktor mana yang lebih dominan menumbuhkan ketaatan krama terhadap *awig-awig*?

a. Sanksi adat

.....
.....

b. Malu kepada prajuru

.....
.....

c. Wujud bakti

.....
.....

II. Persepsi tentang kesantunan bahasa Bali dalam *awig-awig*

1. Menurut Bapak, mengapa dalam *awig-awig* digunakan bahasa *Bali alus*?

a. Karena topiknya adat dan agama

.....
.....

b. Karena krama berupa lintas kasta

.....
.....

c. Karena ingin melestarikan bahasa Bali

.....
.....

d. Karena *bahasa Bali* alus wujud kebijaksanaan

.....
.....

2. Sebagai krama, dengan menggunakan bahasa *Bali alus*, apakah Bapak merasa dihormati atau dihargai?

- a. Ya.....
.....
- b. Tidak.....
.....
3. Apakah penggunaan bahasa *Bali alus* dapat dipandang sebagai wujud kesantunan berbahasa?
- a. Ya.....
.....
- b. Tidak.....
.....
4. Menurut Bapak, manakah kalimat *awig-awig* berikut yang lebih santun?
- a. **Desa pakraman** wenang nibakang pamidanda ring krama sane sisip utawi tungkas ring awig-awig.
Prajuru desa pakraman wenang nibakang pamidanda ring krama sane sisip utawi tungkas ring awig-awig.
.....
.....
.....
5. Menurut Bapak, manakah pasangan kalimat *awig-awig* berikut yang lebih santun?
- Tata cara palas marabian:*
- a. *Patut naur pamidanda panumbas suaran kukul manut pararem.*
- b. *Patut naur prabeya upasaksi sinalih tunggil pada matenga.*
- Tata cara palas marabian:*
- c. *Krama sane jagi palas marabian patut naur pamidanda panumbas suaran kukul manut pararem.*
- d. *Krama sane jagi palas marabian patut naur prabeya upasaksi sinalih tunggil pada matenga.*
.....
.....
.....
.....
6. Menurut persepsi Bapak, manakah kalimat *awig-awig* berikut ini yang lebih santun?

- a. **Yen prade** wenten krama madruwe semeton sane sampun maperabian, sowang-sowang patut tedun ngayah kawastanin ayah ngarep.
- b. Krama sane madruwe semeton sampun maperabian, sowang-sowang patut tedun ngayah kawastanin ayah ngarep.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Menurut persepsi Bapak, manakah kalimat *awig-awig* berikut ini yang lebih santun?

- a. *Pradé wénten krama sané mamaling barang sinanggeh suci, tur sampun prasida kapastika wenang dinanda, tur patut ngwaliang barang sinanggeh suci punika rauhing prabéa pangupakara prayascita manut dresta*
- b. *Krama sané mamaling barang sinanggeh suci wenang dinanda tur patut ngwaliang barang sinanggeh suci punika rauhing prabéa pangupakara prayascita manut dresta.*

.....

.....

.....

.....

.....

8. Dalam *awig-awig* diatur pula prihal hewan piaraan dan tanaman. Dalam pergaulan, pembicaraan tentang hewan dan tanaman umumnya digunakan ragam bahasa Bali kepara (lumrah). Mengapa dalam *awig-awig*, topik tentang hewan dan tanaman diungkapkan dengan bahasa Bali alus?

- a. Wujud penghormatan terhadap krama

.....

.....

.....

- b. Alasan lain

.....

.....

.....
9. Menurut Bapak, apakah ada hubungan penggunaan bahasa *Bali alus* dengan kepatuhan krama desa pakraman?

.....
.....
.....

10. Bagaimanakah tanggapan Bapak terhadap pandangan bahwa penghargaan atau penghormatan terhadap krama dapat meningkatkan ketaatan terhadap *awig-awig*?

a. Setuju

.....

b. Kurang setuju

.....

c. Ragu-ragu

.....

INDEKS

A

Anggah-ungguhing basa 12
artabaya 32
Austin 25, 26, 36, 54, 78
Aziz 14, 79

B

Bale Agung iii, 39, 40, 41, 52, 53
Batarsari 29, 30, 71
bendesa 9, 20, 21
Bloomfield 1
Brown 61
Buleleng 9, 10, 27, 34, 37, 43, 44,
46, 58

C

Chomsky 2

D

Denpasar ii, iv, 9, 35, 36, 42, 61,
78, 79, 80

E

ekstralingual 10

F

Feife 66, 79

G

Gianyar 9, 29, 30, 35, 39, 48, 49,
50, 51, 57, 59
Gunarwan 13, 79

H

Hierarki sosial 11

Hindu 5, 12, 14, 19, 20, 21, 24,
25, 28, 31, 32, 33, 35, 36,
49, 50, 55, 73, 79

J

Jawa Timur 10
Jembrana 9, 10, 40, 41, 52, 56
Jendra 14, 79
Jie 66, 79
Jinengdalem 27, 90

K

kahyangan desa 12, 19, 43, 59,
61
kahyangan tiga 12, 19
Karangasem 9, 30, 31, 32, 37, 47
kearifan lokal 21, 65, 70
kelihan 21, 34

L

Lampung 5
Levinson 61, 66, 79
Lombok 5

M

Majelis Madya Desa Pakraman 9
Majelis Utama Desa Pakraman 9,
20
masyarakat Bali 5, 21, 24, 55, 70,
76
Menaga 30, 31, 67, 68, 74
Mendoyo 56

N

Nababan 2, 16, 25, 26, 36, 52, 54,
66, 80

O

Olaniyi 66, 80

Owens 63, 80

P

palemahan 12, 74

parahyangan 12, 39

pasamuan agung 55

pasupati 55, 56

pawongan 12, 22, 27, 28

perarem 5, 6, 34, 52, 57, 68

Provinsi Bali 5, 6, 8, 9, 12, 22, 23,
24, 80

R

Rendang iii, 32, 33, 37, 74

S

Saussure 1, 2

Simpen 14, 15, 80

Singaraja 10, 23, 55, 78, 81, 90

sor- singih 12

sosiolinguistik 12, 13, 16, 17

Sulawesi Tengah 5

Sulawesi Tenggara 5

Sumerta iii, 35, 36, 42, 61, 67, 70

Surpa 20

T

tri hita karena 12, 20, 22, 25, 50

U

Universitas Udayana 23, 79, 90, 91

W

Wijana 17, 26, 36, 52, 54, 66, 70,
81

TENTANG PENULIS

Nengah Arnawa lahir di Jinengdalem, Singaraja, Bali, pada tanggal 24 Desember 1965. Sejak tahun 1990 sebagai dosen PNS dpk pada IKIP PGRI Bali (kini menjadi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia). Menyelesaikan program doktor linguistik di Universitas Udayana pada tahun 2005, dengan disertasi Bahasa Bali Usia Anak-Anak. Sejak 1 Nopember 2002 ditetapkan sebagai Lektor Kepala dalam mata kuliah Semantik. Beberapa publikasi ilmiah yang telah dihasilkan, antara lain: *Children Indirect Speech Acts at Ages 18 – 24 Month Old: A Case Study on Indonesian Language Aquisition by Balinese Children* (2016); Pergeseran Kosakata Bahasa Bali Ranah Pertanian: Studi Linguistik Kebudayaan (2016); Interpretasi Pragmatis Analogis Metafora Bahasa Bali (2016); *The Implementation of Natural Semantic Metalanguage and Semantic Field in Language Teaching: A Case Study* (2017); *Cecimpedan: Semantic-Cognitive Process on Balinese Children* (2017); *Pragma-Gramatikal Kesantunan Hegemonis Bahasa Bali* (2018); *Balinese Hegemonic Politness in Awig-Awig of Desa Pakraman* (2018); *Personification in Cecimpedan: The Semantic Structure of the Oral Tradition of Balinese Children* (2019); *Metaphors about Balinese Women: From Semantic Analysis to Cultural Pragmatic Interpretations* (2021). Saat ini, sejak 3 tahun terakhir, sedang meneliti gerakan literasi pada Sekolah Luar Biasa.

I Wayan Gunartha lahir di Sangeh, Badung, Bali pada tanggal 21 Desember 1965. Menyelesaikan pendidikan doktor di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2014. Sekarang Lektor Kepala di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Bidang yang digelutinya berkaitan dengan penelitian dan evaluasi pendidikan.

Inyoman Sadwika lahir di Silemadeg, Tabanan, Bali, pada tanggal 16 Juni 1970. Menyelesaikan pendidikan program magister di Universitas Udayana pada tahun 2014. Sekarang sebagai dosen tetap di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan sejak 1 Mei 2012 memiliki jabatan akademik lektor. Bidang yang ditekuninya berkaitan dengan bahasa, aksara, dan sastra Bali.

Dapat digarisbawahi bahwa penghormatan merupakan salah satu strategi hegemonis. Penghormatan itu dapat diwujudkan dengan menggunakan pilihan ujaran yang impositif sehingga menimbulkan kekaguman dan ketersanjungan publik. Penghormatan juga merupakan wujud apresiasi pemimpin terhadap warga terpimpin. Penghormatan merupakan strategi pengelolaan psikologis masyarakat. Penghormatan kepada warga merupakan pergeseran orientasi pembentukan hegemoni sosial dari kekuasaan ke masyarakat pada umumnya. Penghormatan itu dapat diwujudkan dengan penggunaan pilihan aras tutur yang dipersepsi lebih dan sangat sopan. Dalam penelitian ini digunakan ragam bahasa Bali alus singgih. Penggunaan ragam bahasa Bali alus singgih menunjukkan penghormatan penutur kepada petutur dengan parameter pragmatik muka positif (*positive face*). Fakta lingual ini ternyata berhasil membangun kesantunan hegemonis.



ISBN 602534923-2

